



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017

Direktorat
Kebudayaan



370.222

IRA
F

RINGKASAN EKSEKUTIF REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
2017

RINGKASAN EKSEKUTIF REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017

75 halaman

Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Tahun 2017

Penasihat: Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Penanggung Jawab: Suharti, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN)

Penulis: Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Editor: Irana Shalindra

Foto: Dok. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ilustrasi: Impro Visual Story Teller

Desain Cover dan Layout: Briyan B Hendro

DAFTAR ISI

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan **8**

Perombakan **16**

Revitalisasi **22**

Pemerataan **32**

Pendidikan Berkualitas **48**

Penguatan **58**

Revolusi Mental **70**

KATA PENGANTAR



REMBUK Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPKN) tahun 2017 ini mengangkat tema: ***Bersama Membangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan dan Berkualitas***. Dengan tema ini, seluruh pelaku pendidikan dan kebudayaan didorong untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam rangka memperkuat jaringan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pelaku pendidikan dan kebudayaan. Penguatan kerja sama tersebut adalah demi membangun komitmen dalam menuntaskan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 serta merumuskan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2018.

Pelaksanaan RNPKN Tahun 2017 berbeda dengan tahun sebelumnya. Dalam penyelenggaraan RNPKN tahun ini, Presiden RI Joko Widodo berkenan memberi arahan kepada seluruh peserta RNPKN sekaligus menyerahkan Kartu Indonesia Pintar kepada sekitar 2.844 siswa yatim piatu se-Jabodetabek.

Buku Ringkasan Eksekutif RNPKN 2017 menyajikan *highlight* dari keseluruhan rangkaian kegiatan RNPKN tahun 2017. Buku ini merangkum keputusan-keputusan penting dalam RNPKN serta menyajikan hasil rekomendasi RNPKN. Tujuannya, agar pelaku pendidikan dan kebudayaan dapat menjadikan buku ini sebagai acuan dalam menuntaskan kegiatan prioritas tahun 2017 serta merumuskan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2018.

Pada kesempatan ini, atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pelaku pendidikan dan kebudayaan yang hadir dan berperan aktif mengikuti acara RNPKN secara penuh, juga kepada semua panitia penyelenggara yang sudah bekerja keras demi suksesnya kegiatan ini.

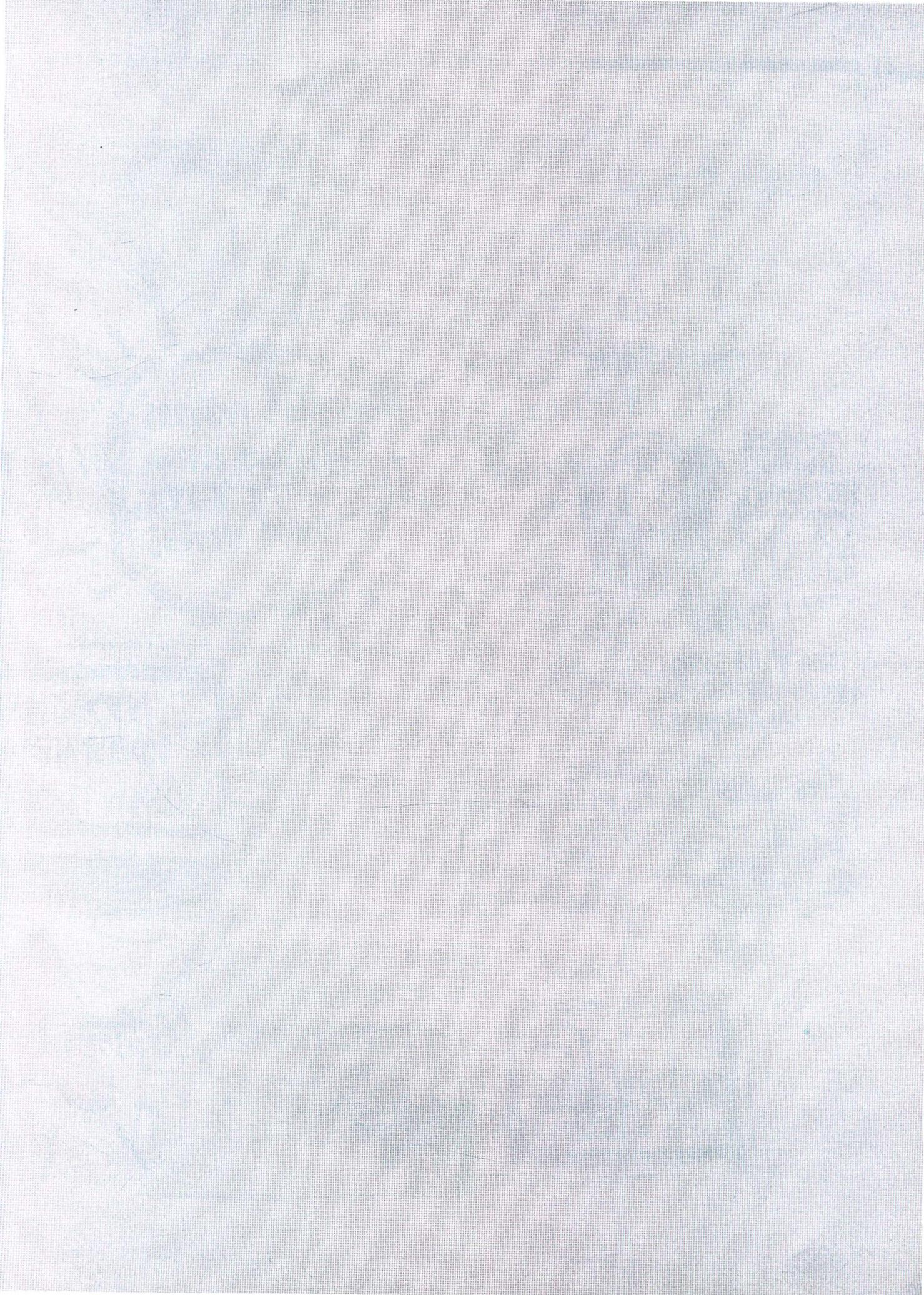
Semoga Buku Ringkasan Eksekutif RNPKN 2017 ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Jakarta, Juni 2017

Sekretaris Jenderal
selaku Ketua Penyelenggara,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Didik Suhardi'.

Didik Suhardi





1

**REMBUK
NASIONAL**

K

ESENJANGAN di Tanah Air sudah lama menjadi kendala dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa. Tidak mengherankan apabila pemerintah menaruh perhatian khusus dan gencar mengusung isu pemerataan untuk mengatasinya.

Di sektor pendidikan, misalnya, masih terdapat ketimpangan yang menjadi tantangan bagi segenap pemangku kepentingan. Salah satu indikator ketimpangan yang bisa kita lihat di antaranya adalah melalui Survei Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Survei tersebut memotret rata-rata lama sekolah setiap provinsi di Tanah Air. DKI Jakarta mencatatkan angka rata-rata lama sekolah 10,88 tahun. Artinya, rata-rata penduduk DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas menjalani pendidikan formal selama kurun 10,88 tahun, atau secara umum hingga kelas XI. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah di Papua hanya 6,15 tahun.

Sejak awal tahun ini, Presiden Joko Widodo sudah mengamanatkan urgensi pemerataan pendidikan sebagai fokus pemerintah. Isu pemerataan pula yang kemudian jadi salah satu sorotan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan rutin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setiap awal tahun.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017 yang diselenggarakan dari tanggal 25 sampai 27 Januari 2017, di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, mengangkat tema *Bersa-*

ma Membangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan, dan Berkualitas.

Sebagaimana pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, RNPK pada tahun ini mendatangkan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota, kepala dinas kebudayaan provinsi, kabupaten dan kota, juga pelaku pendidikan dan kebudayaan lain, seperti dari kalangan komunitas dan sekolah.

RNPK diharapkan dapat memotivasi para pemangku kepentingan mempercepat pembangunan di sektor pendidikan dan kebudayaan yang amat vital.

Para peserta RNPK dibagi dalam sejumlah komisi. Setelah sidang pleno, setiap komisi lalu berdiskusi untuk merumuskan pendekatan yang dapat mendukung realisasi program serta kebijakan prioritas Kemendikbud: Program Indonesia Pintar; revitalisasi pendidikan kejuruan; penguatan pendidikan karakter; serta penguatan pengelolaan pendidikan antara Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan itu, Kemendikbud juga mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran 2016, di samping upaya menjaring bahan masukan untuk penyusunan rencana kerja 2018.

RNPK 2017 diharapkan dapat memotivasi para pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan di sektor pendidikan dan kebudayaan yang amat vital. Pembangunan yang memungkinkan semua warga negara Indonesia, terlepas dari gender, kondisi sosial-ekonomi, maupun aspek tidak relevan lain, mengakses pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas prima.

Pembangunan tersebut tidak akan berhasil hanya dengan dukungan satu-dua orang saja. Kolaborasi apik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat pelaku pendidikan dan kebudayaan sangat perlu untuk merealisasikan cita-cita itu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP. mengungkapkan, saat ini sinergi yang berlangsung perlu dioptimalkan. Masih ada tumpang tindih kebijakan sektor pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama soal sarana dan prasarana. Hal itu antara lain disebabkan faktor kebijakan otonomi daerah yang belum dibarengi penataan tugas dan tanggung jawab terperinci antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Alhasil, banyak orang, misalnya, tetap beranggapan bahwa seluruh tanggung jawab sektor pendidikan, termasuk pembangunan dan pengelolaan sarana serta prasarana pendidikan, adalah tanggung jawab pemerintah pusat/Kemendikbud. Padahal, tidak seluruhnya.

Pendidikan bukan semata urusan pemerintah pusat, dan sebaliknya, bukan hanya urusan pemerintah daerah. Pendidikan adalah urusan kita bersama sehingga perlu dibenahi bersama. Membangun dan menata kebersamaan tersebut memang tidak semudah membalikkan tangan. Akan tetapi, amat krusial untuk diwujudkan agar Indonesia memiliki sektor pendidikan dan kebudayaan merata, berkeadilan, dan berkualitas.

RNPK merupakan rapat koordinasi teknis Kemendikbud. Program dan kegiatan yang diulas dalam RNPK bertujuan untuk mewujudkan Misi Rencana Strategis (Renstra) 2015—2019. Apa saja?

- Pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- Akses yang meluas, merata, dan berkeadilan
- Pembelajaran yang bermutu
- Pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- Penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Renstra mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Memasuki tahun ketiga ini, fokus sasaran RPJMN 2015-2019 adalah pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus kecakapan pemanfaatan iptek. Semua itu agar Indonesia bisa menjawab kebutuhan di lingkup regional, umpama dengan mengaitkan kepada eksistensi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maupun lingkup global.

Oleh karena itu, kita pun perlu melakukan konsultasi aktif, bukan hanya sebatas Kemendikbud dengan unsur-unsurnya di daerah, melainkan juga dengan kementerian/lembaga lain yang ikut menyelenggarakan fungsi pendidikan dan kebudayaan.

RNPK 2017

Bersama Membangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan, dan Berkualitas

25-27 Januari 2017

di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat

1.087

orang peserta, terdiri dari:

Jajaran pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 Kemendikbud

Kepala Dinas Provinsi

Kepala Dinas Kabupaten/Kota se-Indonesia

Anggota DPR RI

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(LPTK), Badan Akreditasi Nasional (BAN)

The Southeast Asian Ministers of

Education Organization (SEAMEO),

Organisasi masyarakat di bidang pendidikan

dan kebudayaan

Atase Dikbud

Komunitas Peduli Pendidikan



Kegiatan Inti:

Sidang Pleno 1



Diskusi Komisi I: peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan

Komisi II: peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

Komisi III: penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan.



Sidang Pleno 2



Tujuan:

- Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2016.
- Sinergi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas 2017 dengan fokus utama program Indonesia Pintar, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan, penguatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan antara Kemendikbud dan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Menyepakati kebijakan operasional 2017 dan memberi masukan untuk kebijakan serta program 2018
- Meningkatkan sinergi Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan publik/masyarakat komunitas pendidikan dan kebudayaan.

REMBUK NASIONAL

PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

2017



"BERSAMA MEMBANGUN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN YANG
MERATA, BERKEADILAN
DAN BERKUALITAS"

BPG. MUHADJIR
EFFENDY
(MENDIKBUD)





PENGALAMAN
DUNIA INDUSTRI



PENGGUNAAN
TEKNOLOGI DALAM
PROSES BELAJAR





2

PEROMBAKAN

P

EROMBAKAN adalah kata kunci. Dalam arahan awal tahun tentang arah kebijakan dan program strategis Kemendikbud 2017, Presiden Joko Widodo telah meminta agar kita melakukan perombakan signifikan. Pesan tersebut diungkapkan Mendikbud Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP. dalam momen Malam Inspirasi, pada hari pertama RNPk.

Perombakan sektor pendidikan, menurutnya, dengan menggarisbawahi urgensi revolusi mental atau karakter, revolusi budi pekerti, juga revolusi akhlak. Oleh karena itu, muatan budaya, keunggulan lokal, kearifan, maupun kecerdasan lokal harus mendapat ruang sebesar mungkin.

Kebudayaan bukan subordinat dari pendidikan, melainkan menjelma roh pendidikan. Arah pendidikan kita harus selaras, dan diberi sapuan spiritual dari nilai-nilai kebudayaan kita, begitu tutur Mendikbud dalam kesempatan tersebut.

Harapan Mendikbud, para Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang hadir dalam RNPk 2017 berperan aktif untuk mengkreasi aktivitas pendidikan di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur kebudayaan lokal.

Perombakan sektor pendidikan adalah juga untuk menaikkan daya saing dan daya inovasi bangsa ini. Dalam dokumen *Global Opportunities Index* 2016-2017, daya saing Indonesia ada di peringkat 41 dari 138 negara. Posisi itu turun dari peringkat 37

pada survei serupa periode 2015-2016.

Untuk mengangkat kemampuan bersaing di kancah regional ataupun global, tidak bisa tidak, kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk berinovasi pun harus dibenahi.

Guna mendukung kepentingan tersebut, ada dua hal yang tengah digiatkan oleh pemerintah. Pertama, peningkatan kualitas guru. Kedua, pengayaan pengalaman praktik kerja bagi siswa.

Optimalisasi kapasitas tenaga pendidik antara lain dilakukan dengan perbaikan pelatihan bagi guru sehingga tercipta guru yang luwes dan responsif, serta cakap dalam memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Peningkatan kualitas guru juga dimaksimalkan lewat penguatan profesionalisme mereka.

“Profesi guru di Indonesia masih dianggap pekerjaan *soft professional*. Ini menjadi salah satu faktor mengapa kualitas pendidikan kita masih rendah,” kata Mendikbud mengutip pernyataan Samuel Huntington, bahwa *expertise* (keahlian), *social responsibility* (tanggung jawab sosial), dan *corporateness* (rasa kesejawatan) merupakan tiga syarat agar guru menjadi pekerjaan profesional.

Menurutnya, ada dua tipe profesi yaitu profesi asosiasional yaitu untuk pekerja yang tidak butuh kerja sama satu dengan lain, dan profesi korporasional yang merupakan kebalikannya. Guru adalah contoh profesi yang bersifat korps. Dengan demikian, penting agar asosiasi guru berkolaborasi satu



sama lain demi melahirkan anak-anak didik yang mumpuni.

Tahun ini, sebagai bagian dari strategi penguatan peran guru, Kemendikbud mempercayakan pembuatan soal dan evaluasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada para guru. Adapun pemerintah hanya memberikan pedoman dan kisi-kisi.

Kepercayaan itu dilandasi harapan agar guru tidak merasa perlu membocorkan soal-soal USBN tersebut kepada murid-murid bersangkutan karena percaya mereka akan dapat mengerjakan dengan baik. Itu juga akan menjadi ujian kejujuran bagi para guru yang memang wajib mengajarkan dan menjadi teladan soal kejujuran bagi murid-murid mereka.

Penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang lebih kompetitif juga diupayakan dengan memperkaya pengalaman nyata siswa akan praktik dunia industri, misalnya lewat penguatan integrasi sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Perihal penyelarasan SMK dengan kebutuhan DUDI tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden sekaligus Ketua Penasihat Komisi Ekonomi dan Industri

Nasional (KEIN) Sofjan Wanandi turut urun bicara dalam Malam Inspirasi RNPk 2017. Ia beranggapan, amat krusial untuk mengadakan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menjadi kebanggaan bagi generasi saat ini dalam memajukan Indonesia.

Menurut Sofjan, 60% dari tenaga kerja nasional masih didominasi lulusan SD dan SMP. Faktor tingkat pendidikan tersebut kemudian berkaitan dengan produktivitas mereka yang disebutnya terbelang rendah. “Pada saat kita menerima tenaga kerja di Indonesia itu, tidak ada tenaga kerja yang siap pakai, selalu harus kita *train* kembali,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyadari, masih ada kesenjangan antara tenaga kerja yang ‘dilahirkan’ lembaga pendidikan di Tanah Air dewasa ini dan kebutuhan DUDI. Ia memang tidak menafikan adanya tenaga kerja berkualitas tercipta dari sistem pendidikan kita. Namun, menurutnya, masih lebih banyak yang gagap dalam memenuhi ekspektasi DUDI.

Becermin pada kondisi itu, Sofjan sepakat perlunya kerja sama lebih erat antara DUDI dan sekolah untuk memunculkan lulusan-lulusan yang sesuai standar dunia kerja.



Kolaborasi Dua Kementerian

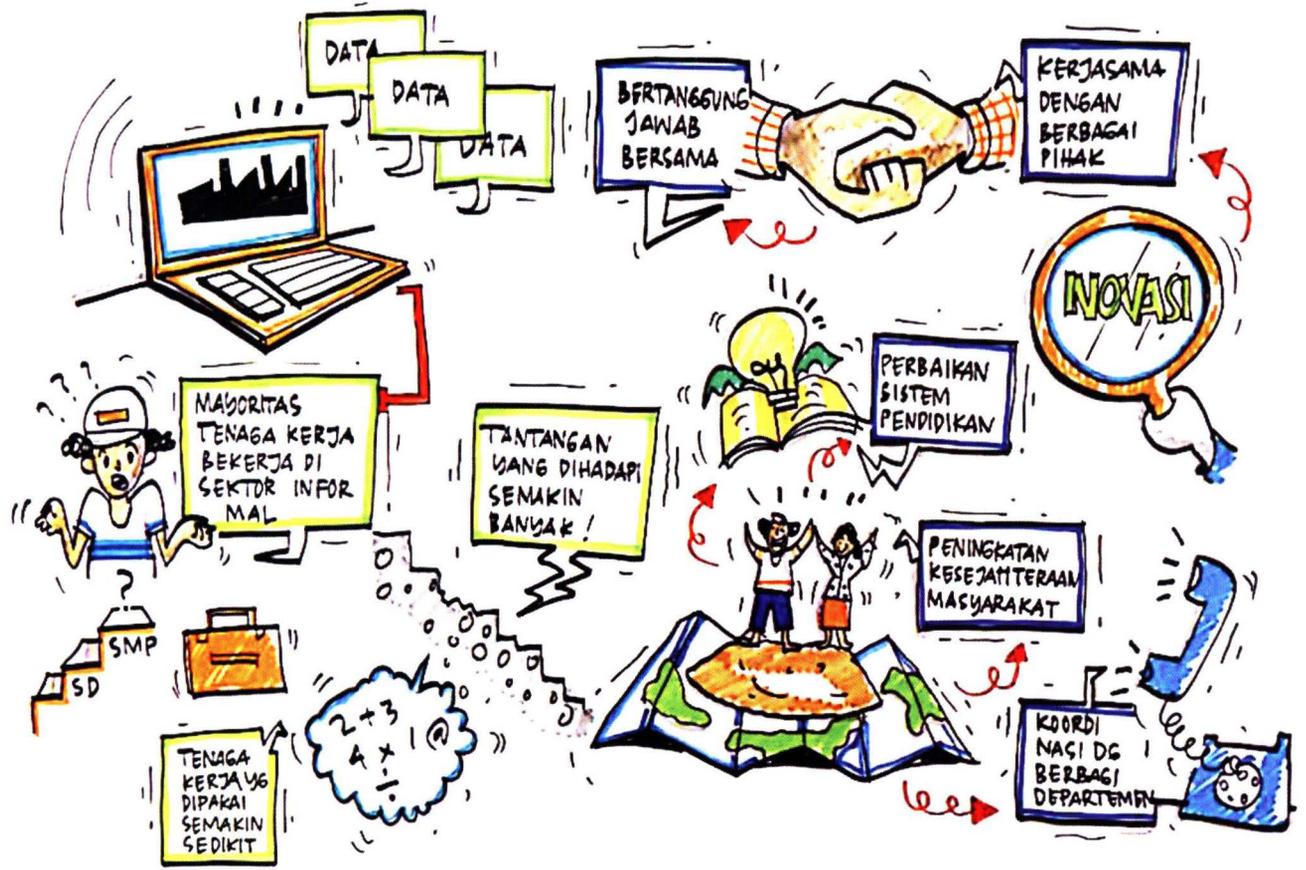
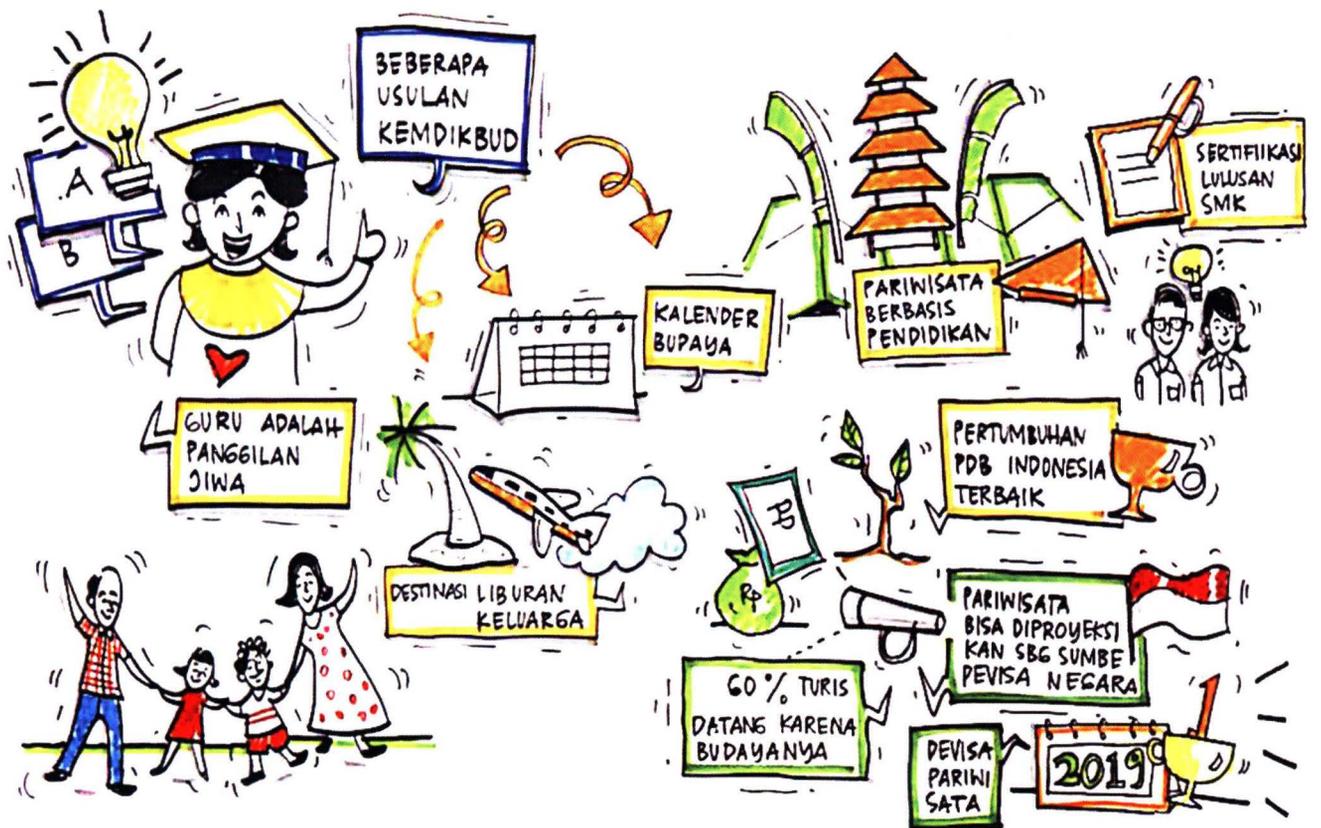
PARIWISATA dalam tahun-tahun belakangan ini semakin diharapkan menjadi salah satu penyumbang utama devisa negara. Pada 2019, sektor itu diprediksi akan menjadi kontributor devisa terbesar bagi Indonesia.

Sebagaimana sektor usaha lain, memperkokoh sektor pariwisata perlu didahului dengan keberadaan tenaga kerja yang cakap. Seusai menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan Mendikbud, Menteri Pariwisata Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc. menjelaskan bahwa MoU tersebut berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis pendidikan dan kebudayaan,

Kementerian Pariwisata misalnya memberikan sertifikasi terhadap lulusan SMK dengan standar MRA --Sertifikasi Standar Pekerja Negara ASEAN.

Kementerian Pariwisata juga mendukung rencana pembuatan kalender kebudayaan. Kalender itu diharapkan bisa memancing animo dari para wisatawan, asing maupun lokal untuk mengeksplorasi kekayaan kultur Nusantara.

Sebelumnya, berkaitan dengan kegiatan pariwisata dan kalender kebudayaan, Mendikbud telah menggulirkan wacana perubahan hari belajar di sekolah, yang akan dibatasi Senin sampai Jumat. Adapun Sabtu dan Minggu menjadi hari keluarga dan hari wisata. "Dengan begitu, objek wisata yang ada di Indonesia bukan hanya dinikmati oleh wisata asing saja tetapi kita juga bisa menikmati wisata di Indonesia," terangnya.





3

REVITALISASI

BAGAIMANA menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang mumpuni? Yang handal bersaing di kancah global?

Isu tersebut dilontarkan Presiden Joko Widodo ketika ia membuka RNP 2017, di Jakarta International Expo, Kamis (26/1).

Dewasa ini, ungkapnya, sekitar 42% tenaga kerja di Tanah Air hanyalah lulusan SD. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Tanpa revitalisasi sektor pendidikan dan kebudayaan, Indonesia akan tertinggal dalam persaingan dunia. Apalagi, Indonesia diestimasi akan menikmati bonus demografi pada 2030. Jangan sampai angkatan kerja yang berlimpah kelak tidak memiliki kecakapan dalam menjawab tantangan global. “Kalau kualitasnya tidak kita siapkan, ini akan menjadi bumerang bagi negara kita, bagi kita semuanya,” ujar Presiden.

Presiden berpandangan, peningkatan kompetensi SDM Indonesia bisa diupayakan melalui perbaikan kualitas pendidikan vokasi alias kejuruan. Baik dari sisi sarana maupun prasarana di sekolah-sekolah kejuruan yang ada.

Salah satu faktor peningkatan kualitas yang disinggung Presiden adalah perihal aspek kemampuan tenaga pengajar kejuruan. Faktor yang sedikit banyak memengaruhi kualitas peserta didik. Dari laporan yang ia himpun, kebanyakan guru sekolah menengah kejuruan (SMK) saat ini adalah guru normatif. Idealnya, pengajar-pengajar di SMK lebih

didominasi guru pelatih, paling tidak sekitar 70%.

“Harus mulai dilakukan *training* sehingga guru SMK itu lebih banyak yang bisa melatih seperti merakit sepeda motor, membuat aplikasi. Jangan terus menerus kita linier, monoton, dan terjebak rutinitas tanpa ada loncatan perubahan,” harapnya.

Era modernisasi yang dibarengi kecanggihan teknologi telah menciptakan banjir informasi. Dibutuhkan kemampuan agar para peserta didik dapat memilah informasi yang baik dengan buruk dan tidak hanyut terbawa perubahan kultur.

Karakter

Tentunya bukan hanya *skill* peserta didik yang mesti diasah. Karakter siswa juga menjadi salah satu elemen yang perlu dibangun. Apalagi, era modernisasi yang disertai kecanggihan teknologi telah menciptakan banjir informasi. Dengan melihat fenomena itu, peserta didik perlu dibekali dengan



kemampuan memilah antara informasi yang baik dan buruk agar tidak hanyut terbawa perubahan kultur. “Sejatinya pendidikan karakterlah yang jadi inti pendidikan sesungguhnya. Kemajuan pendidikan berpusat pada guru, pengajaran tertanam pada diri siswa dan akan terbawa terus sampai kapan pun,” tutur Presiden.

Pembangunan karakter memang bukan hal mudah dewasa ini. Terutama dengan kian menurunnya interaksi sosial, bahkan hingga tingkat keluarga. Namun, Presiden berharap penanaman budi

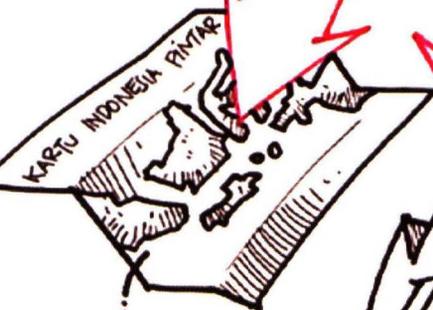
pekerti, kesopanan, dan kesantunan, dapat disampaikan secara terus menerus kepada para peserta didik. Misalnya, dengan mewajibkan mereka ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, atau mengadakan kegiatan kemasyarakatan/sosial seperti mengunjungi panti jompo.

“Kalau punya kemampuan, anak-anak diajak ke provinsi lain untuk mengenalkan saudara-saudaranya yang berada di pulau yang lain. Hal itu akan sangat baik untuk keragaman kita, kebhinekaan kita,” lanjutnya.

PERESMIAN PEMBUKAAN REMBUK NASIONAL 2017

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3 ISU
PENTING

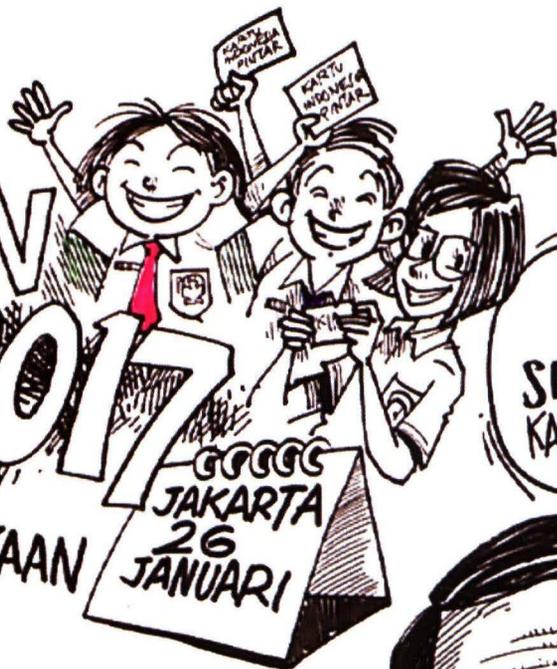


PENINGKATAN
PEMERATAAN
LAYANAN
PENDIDIKAN

PENINGKATAN MUTU
RELEVANSI DAN
DAYA SAING.



PENGUATAN
TATA KELOLA
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN



BOLEH
BELI SE
BAYAR

DIPASTIKAN
SEMUA MEN
KARTU INDONESIA





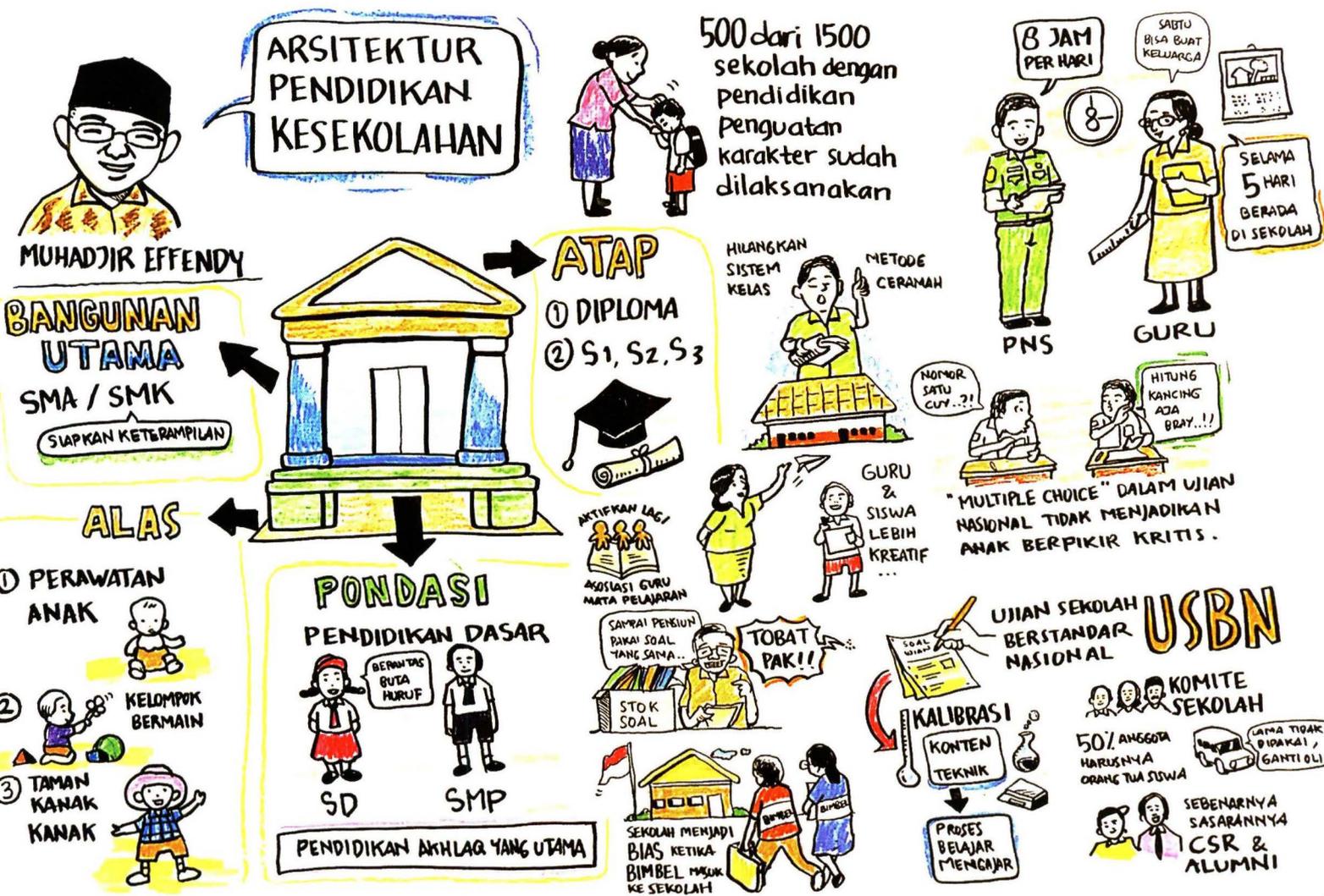
Ide lain dari Presiden adalah dengan menggiatkan lomba-lomba antarsekolah mulai tingkat kecamatan. Suatu aktivitas yang dahulu sering dilakukan dan kini mulai memudar. “Saya ingat, saat kita masih kecil ada lomba per kecamatan. Setiap semester, sebelum libur. Sekarang tidak banyak. Mungkin anak-anak sekarang lebih modern, jadi bisa lomba membuat video, blog, atau aplikasi,” usulnya.

Penguatan karakter siswa menjadi krusial lantaran di era milenial ini, perang atau penghancuran atas suatu negara bukan lagi didominasi perang fisik atau perebutan teritori. Yang kini lebih mengemuka adalah perang ideologi dan penyerangan sistem mentalitas.

Sekolah pun perlu memperkenalkan penguasaan teknologi informasi kepada para peserta didik sedini mungkin. Di saat yang sama, juga memagari mereka dari dampak negatif penggunaan media sosial.

Presiden menegaskan, penguatan karakter siswa menjadi krusial lantaran di era milenial ini, perang atau penghancuran atas suatu negara bukan lagi didominasi perang fisik atau perebutan teritori. Yang kini lebih mengemuka adalah perang ideologi dan penyerangan sistem mentalitas.

“Dimulai dari penyerangan sosial budaya. Hati-hati, yang akan terjadi nantinya adalah perang budaya, perang ekonomi, perang keuangan, perang informasi, perang dalam membangun sebuah persepsi,” ungkap Presiden.



Arsitektur Kesekolahan

Kelak, dalam pengejawantahannya, pembangunan karakter akan diprioritaskan pada level SD dan SMP. Kemendikbud menargetkan persentase pendidikan karakter untuk siswa-siswi SD 70%, sementara SMP 60%.

Ibarat rumah, tingkat SD dan SMP adalah fondasi dalam konsep arsitektur kesekolahan yang dirancang Kemendikbud. Maka, di situlah pendidikan karakter menjadi prioritas. Adapun alas/papan dalam konsep tersebut ialah pendidikan anak usia dini (PAUD), sementara bangunan utamanya adalah SMA, juga SMK seiring penekanan pemerintah terhadap pendidikan vokasi/kejuruan.

Sebuah rumah tentu membutuhkan atap. Dalam hal ini, arsitektur bangunan pendidikan nasi-

onal diatapi oleh perguruan tinggi, mulai dari tingkat diploma sampai pascasarjana.

Kemendikbud menilai konsep arsitektur kesekolahan krusial untuk menunjang kebijakan-kebijakan regulator sektor pendidikan dan kebudayaan nasional. Tahun ini, di samping soal pendidikan karakter, akan dirilis pula kebijakan terkait Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, maupun ketentuan bagi guru untuk mengajar 8 jam di kelas per hari.

Khusus untuk guru yang menduduki posisi kepala sekolah, ia tidak perlu mengajar di kelas kecuali ada kondisi penting. Hal itu disebabkan posisi kepala sekolah sudah menjadi pekerjaan pokok seorang guru yang mendapat mandat menjadi manajer sekolah.



Fleksibilitas tersebut diberikan agar kepala sekolah dapat fokus pada tiga tugas pokoknya: memajukan sekolah, mencerdaskan siswa, dan meningkatkan kesejahteraan guru. Di sisi lain, pendidik juga dituntut untuk terus mengembangkan kapasitas diri masing-masing supaya bisa mencerdaskan peserta didik.

Salah satu usulan yang diutarakan Mendikbud Muhadjir Effendy agar guru dapat memacu kapasitasnya adalah dengan mereaktivasi forum diskusi antar guru mata pelajaran.

“Andaikata diperlukan, bangun interaksi dengan guru mata pelajaran yang ada di luar negeri. Di sini peran Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menjembatani guru kita dengan

komunitas guru internasional,” ucap Mendikbud dalam Sidang Pleno RNPk 2017 se usai pembukaan oleh Presiden.

Kemendikbud juga akan memaksimalkan pemberdayaan Komite Sekolah. Struktur Komite Sekolah kelak adalah lebih dari 50% anggota berasal dari orang tua murid. Dengan begitu, publik punya partisipasi lebih besar dalam mengawasi kualitas pengajaran yang berlangsung di sekolah tempat anak-anak mereka berada.

“Kemudian, sistem zonasi akan kita berlakukan supaya siswa yang mampu dan pintar tidak terkumpul pada satu sekolah saja. Ini sesuai dengan program pemerintah yang mendorong pemerataan,” tegas Mendikbud.



Masa Depan Lebih Benderang

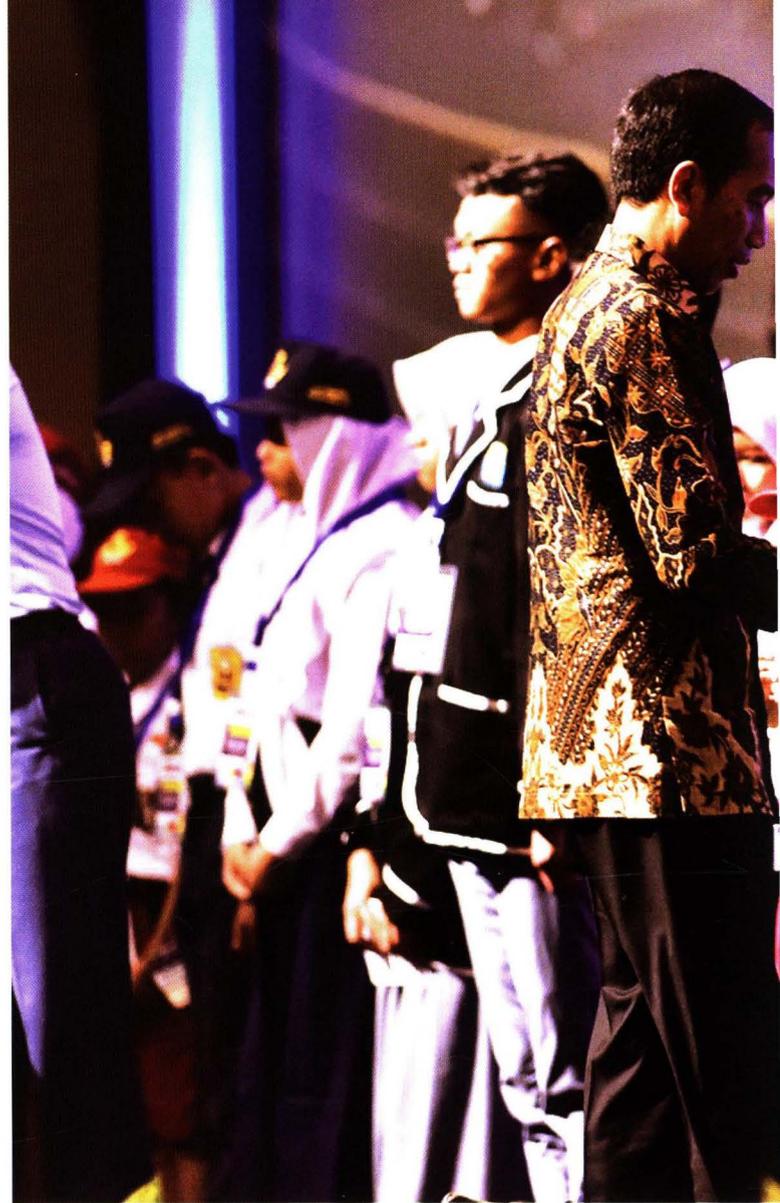
"GURU *keyboard*." Begitu jawab Muhammad Lutfi, 8, saat ditanya Presiden Joko Widodo mengenai cita-citanya. Bocah yang duduk di kelas 1 SD Sekolah Luar Biasa (SLB) 7 Jakarta itu memang hobi bermain musik, utamanya instrumen *keyboard* yang ia kenal semenjak diasuh di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Cahaya Bathin, Jakarta Timur.

Sebelum menjejak dunia pendidikan formal, penyandang tuna netra tersebut sulit berkomunikasi dengan orang lain. Namun, sejak menjadi siswa SLB 7 Jakarta setahun lalu, kemampuan berkomunikasi Lutfi berkembang. Di sekolah pun, ia juga leluasa bermain dengan *keyboard* yang disukainya.

Saat ini, Lutfi dapat bersekolah dan tinggal di panti tanpa dibebani biaya karena adanya program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berkat KIP, masa depan Lutfi kini menjadi lebih benderang.

Guru pendamping Lutfi, Windarto, berharap, pemerintah terus memberi dukungan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan akses untuk mobilitas di sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Ia mengakui akses yang ada belum cukup memadai untuk menjawab kebutuhan mobilitas siswa-siswi penyandang tuna netra. "Jadi, anak-anak agak lambat untuk menuju suatu tempat saat berada dalam sekolah," paparnya.

Lutfi dan Windarto adalah sedikit dari ribuan siswa dan pengajar yang menghadiri peresmian RNPk 2017 oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta International Expo Kemayoran, Kamis (26/1). Dalam acara itu, Lutfi menjadi satu dari 12 penerima KIP langsung dari Pre-



siden. Adapun jumlah KIP yang dibagikan Presiden secara simbolis dalam kesempatan tersebut mencapai 2.844, yang ditujukan kepada para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tinggal di panti asuhan wilayah Jabodetabek.

Tahun ini, pemerintah menargetkan pembagian 19 juta KIP, termasuk 760 ribu untuk anak yatim piatu di seluruh Indonesia. Untuk anak SD, nilai bantuan KIP per bulan mencapai Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, dan SMA/SMK Rp1 juta.

Bantuan yang dapat dicairkan di BRI atau BNI tersebut, menurut Presiden, boleh



dipakai untuk membayar iuran sekolah, atau membeli buku. Untuk membeli sepatu maupun seragam sekolah pun silahkan.

Nah, kalau untuk pulsa ponsel? “Tidak boleh untuk beli pulsa,” tegasnya.

“Ingat ya, jangan sampai uang yang diambil dari kartu itu dipakai beli pulsa. Kalau nanti saya tahu, kartunya saya cabut,” ancam Presiden separuh berkelakar.

Kemudian, seperti kebiasaannya dalam berbagai acara, RI 1 pun melontarkan kuis kepada siswa-siswi yang berani maju ke panggung. Pertanyaan yang diberikan ia sesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

Sebelum mengakhiri sesi kuis, Presiden menyampaikan pesan untuk para siswa penerima KIP yang hadir di Jakarta International Expo Kemayoran. “Belajar yang baik, ibadah yang baik, dan olah raga yang giat”.

Dalam forum serupa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani melaporkan, ada total 896.781 anak yatim piatu yang terdata pada 2016. “Dari jumlah itu, anak yatim piatu penerima KIP baru 155.933. Masih ada 767.484 anak yang belum menerima KIP dan akan mendapat manfaat dana program ini pada 2017,” janji Puan.



4

PEMERATAAN

SEJALAN dengan tema RNPk 2017, pada Kamis (26/1), para peserta yang tergabung dalam Komisi 1 bersidang dengan tema *Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan*.

Komisi 1 dibagi dalam dua subkomisi. Sidang Komisi 1A mengulas topik Optimalisasi Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), sementara Komisi 1B bertopik Membangun Pendidikan dan Kebudayaan dari Pinggiran.

Isu yang menguat dalam sidang subkomisi 1A berkisar mulai dari mekanisme pendataan serta penetapan penerima KIP, pendampingan anak yang putus sekolah kembali ke sekolah, sampai penguatan sosialisasi KIP.





Subkomisi 1A

Optimalisasi Pelaksanaan KIP

1. Mekanisme pendataan, penetapan penerima, penyaluran, dan pencairan dana (tunai/non tunai) beserta sosialisasinya

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Mengoptimalkan verifikasi dan validasi data KIP.	Distribusi KIP secara akurat dan tepat sasaran.
2.	Satuan pendidikan mengusulkan peserta didik sebagai penerima PIP.	Pendataan komprehensif peserta didik yang kurang mampu sebagai calon penerima KIP.
3.	Menginformasikan kepada satuan pendidikan bahwa dana PIP sudah tersedia di bank penyalur.	Penyaluran dana PIP dari bank penyalur kepada penerima KIP.
4.	Meningkatkan sosialisasi melalui media massa dan media sosial.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PIP.
5.	Memperbaiki penyaluran kartu lewat dinas pendidikan atau satuan pendidikan.	Penyaluran KIP lebih tepat waktu.

2. Penguatan peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota)

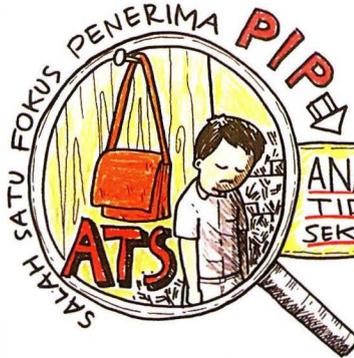
No.	Rencana Aksi	Target
1.	Melibatkan UPTD tingkat kecamatan, perangkat desa sampai tingkat RT dalam pendataan sasaran KIP.	Pendataan sasaran KIP dengan tepat.
2.	Menyiapkan bank penyalur di tingkat daerah.	Terpantaunya kesiapan bank penyalur dalam penyaluran dana PIP.
3.	Membentuk koordinator pengelolaan PIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	Terbentuknya koordinator pengelolaan PIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataan, penyaluran dan monitoring KIP.
4.	Membangun Sistem Pendistribusian KIP/PIP.	Distribusi KIP tepat waktu.
5.	Mengendalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) terutama di nonformal.	Terverifikasi dan tervalidasinya calon peserta didik penerima KIP dan lembaga pengusul.

3. Pendampingan Anak Tidak Sekolah (ATS) kembali ke sekolah/kesetaraan/kursus

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Menyosialisasikan himbauan pemerintah tentang “anak bukanlah sumber ekonomi keluarga” kepada masyarakat.	Tersosialisasinya himbauan pemerintah bahwa “anak bukanlah sumber ekonomi keluarga” kepada masyarakat.
2.	Mengadvokasi orangtua perihal pentingnya pendidikan dan sekolah bagi anak.	Teradvokasinya orangtua perihal pentingnya pendidikan dan sekolah bagi anak.
3.	Meningkatkan kepedulian tokoh masyarakat terhadap ATS.	Terwujudnya kepedulian tokoh masyarakat terhadap ATS.

REMBUK NASIONAL

KOMISI I, SUBKOMISI A



OPTIMALISASI PELAKSANAAN PIP





Indonesia Pintar di Mamuju

DALAM sidang Subkomisi 1A, Bupati Mamuju Habsi Wahid memaparkan praktik Gerakan Kembali ke Sekolah (GKS) yang merupakan perwujudan Program Indonesia Pintar di daerahnya.

Meski menjadi Ibu Kota bagi Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju merupakan kabupaten dengan kualitas hidup masyarakat yang masih relatif rendah. Kabupaten tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi 7,71% per 2015. Namun, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Mamuju hanya Rp30,39 juta. Sebagai pembanding, tingkat PDRB nasional pada 2015 sekitar Rp48 juta.

Untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terang Bupati Mamuju, pemerintah kabupaten melakukan berbagai strategi. Salah satunya adalah mengimplementasikan GKS.

Program GKS bertujuan untuk mengajak anak-anak usia sekolah yang terputus pendidikannya, atau diistilahkan anak tidak sekolah (ATS), kembali ke kelas.

“Kami memberi bantuan seragam gratis kepada anak-anak yang kembali sekolah. Dari tahun ke tahun, jumlahnya meningkat,” ungkapnya ketika memaparkan praktik GKS dalam sidang Subkomisi 1A di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Kamis (26/1).

Penyelenggaraan GKS oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, menurutnya, terbilang sukses. Itu antara lain tampak dari sertifikat yang didapat Mamuju dari Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai daerah pelaksana GKS dengan jumlah anak kembali sekolah terbesar.

“GKS juga dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti UNICEF, pihak kepolisian, dan swasta,” imbuhnya.

Sementara itu, guna meningkatkan kualitas pengawasan program, kata Habsi, Mamuju saat ini sedang mengujicoba penggunaan Sistem RapidPRO.

Ia mengakui, pelaksanaan GKS bukan tanpa aral melintang. Untuk pelaksanaan program pada 2016, pihaknya menemukan bahwa sebagian anak tidak lagi dapat kembali ke sekolah formal karena faktor umur. Kemudian, proses pengusulan KIP untuk sejumlah anak yang telah dikembalikan ke sekolah ternyata masih memakan waktu.

Sementara itu, Subkomisi 1B membahas salah satu strategi mendorong pemerataan di Tanah Air, yaitu dengan membangun dari wilayah pinggir. Bukan semata fisik, tapi juga manusia-manusianya.

Peningkatan kualitas manusia itu misalnya dengan jalan menambah ragam penyediaan pen-

didikan yang sejalan dengan konteks sosial setempat. Pendekatan lain adalah dengan menekan ketimpangan antarwilayah dalam ketersediaan layanan pendidikan berkualitas, umpama lewat program Sekolah Garis Depan (SGD) dan Guru Garis Depan (GGD).

Subkomisi 1B

Membangun Pendidikan dan Kebudayaan dari Pinggiran

1. Penetapan tata kelola Sekolah Garis Depan sebagai sekolah laboratorium

No.	Rencana Aksi	Target
1.	a. Memperbaiki kurikulum sesuai dengan muatan budaya lokal. b. Menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan c. Menyiapkan sarana dan prasarana	Tersedianya regulasi yang memungkinkan sekolah sebagai satuan teknis di bawah Kemendikbud.
2.	Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya meningkatkan pendidikan dan kebudayaan di daerah 3T.	Masyarakat menyadari pentingnya meningkatkan pendidikan dan kebudayaan di daerah 3T.

2. Penyiapan tata kelola Guru Garis Depan

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Mengadakan GGD dari daerah lokal.	Terpilihnya GGD dari daerah lokal.
2.	Membekali GGD dengan diklat prajabatan (diklat profesi guru bagi GGD).	Terbekalnya GGD yang diharapkan dapat beradaptasi dengan masyarakat sekitar.

3. Penguatan pendidikan khusus dan layanan khusus (termasuk pendidikan inklusif dan program afirmasi)

No.	Rencana Aksi	Target
1.	a. Menerbitkan peraturan mengenai minimal satu sekolah inklusif per satu kecamatan. b. Menerbitkan panduan kerja sama sekolah inklusif dengan SLB dalam hal berbagi sumber daya dan pendampingan layanan. c. Membangun sekolah berasrama untuk ABK. d. Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah inklusif.	Revitalisasi sekolah inklusif sesuai dengan kondisi sosial budaya.
2.	a. Menyosialisasikan/mengampanyekan pendidikan inklusif kepada masyarakat. b. Melaksanakan pendidikan dan pendataan keluarga dengan ABK. c. Melibatkan publik untuk mempermudah kegiatan pendidikan inklusif.	Kesadaran orang tua meningkat terhadap pentingnya pendidikan inklusif.

3.	a. Meningkatkan kompetensi tambahan kepada guru relevan dengan ABK. b. Melatih guru-guru yang kompeten untuk sekolah inklusif.	Tersedianya guru pendidikan inklusif.
4.	a. Memanfaatkan video tutorial untuk guru inklusif yang dapat digunakan secara massal. b. Membuat video/media pembelajaran untuk anak tuna rungu, tuna netra, dan lain-lain.	Tersedianya TIK untuk pembelajaran inklusif.
5.	a. Menyusun regulasi (perda, pergub, perbud, perkot) untuk ABK di lingkungan pemda setempat. b. Memberikan subsidi tambahan untuk ABK. c. Membiayai infrastruktur untuk pendidikan inklusif.	Tersusunnya regulasi yang mendukung program pendidikan inklusif.
6.	Merancang sistem pelayanan pendidikan tertentu yang menonjolkan prestasi Anak Superior.	Tersedianya guru yang kompeten dalam Sistem Pendidikan dan Layanan Anak Superior/CIBI.

4. Penyiapan infrastruktur TIK untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan

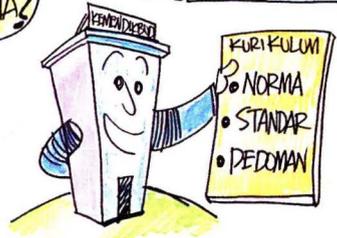
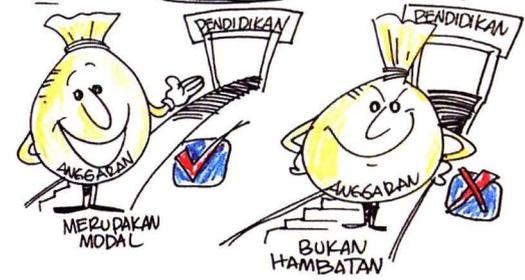
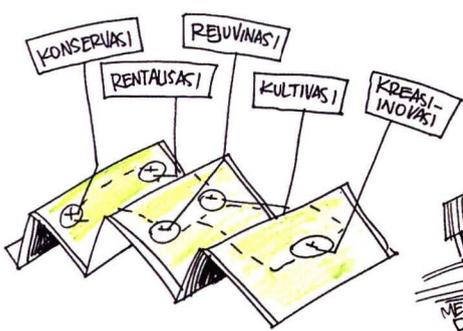
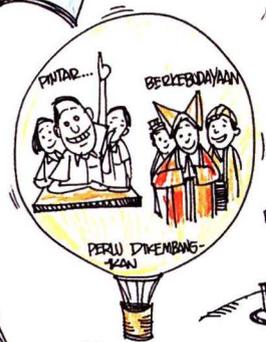
No.	Rencana Aksi	Target
1.	a. Memberdayakan forum/asosiasi operator sekolah. b. Menerbitkan peraturan yang memperbolehkan pemanfaatan teknisi TIK dan listrik di setiap sekolah.	Termanfaatkannya TIK secara optimal dalam meningkatkan capaian belajar peserta didik.
2.	a. Membangun dan mengoperasikan jaringan informasi bersama antara sekolah yang terdekat dan desa terdekat. b. Mengeluarkan kebijakan perlakuan khusus untuk kondisi geografis tertentu guna membangun jaringan informasi bersama. c. Membangun kerja sama dengan Kemenkominfo untuk bantuan dana TIK.	Tersedianya koneksi/jaringan yang merata bagi seluruh sekolah di Indonesia.
3.	Membangun kerja sama dengan Kementerian ESDM dan Pemda untuk penyelenggaraan alternatif energi listrik.	Tersedianya aliran energi listrik bagi seluruh sekolah di Indonesia.
4.	Menyelenggarakan pelatihan TIK untuk guru.	Kompetensi guru terhadap pemanfaatan TIK meningkat
5.	a. Menyediakan akses email untuk guru dan siswa (domain email <i>guru.id</i> dan <i>siswaku.id</i>). b. Membuat pangkalan konten di Kemendikbud atau di daerah (provinsi atau kabupaten/kota).	Termanfaatkannya akses domestik untuk materi TIK.

5. Perluasan akses dan peningkatan sumber daya kebudayaan di daerah

No.	Rencana Aksi	Target
1.	a. Membentuk lembaga kebudayaan. b. Merealisasikan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. c. Merealisasikan Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.	Hadirnya wadah kepengurusan organisasi dalam rangka meningkatkan potensi daerah.
2.	Menyelenggarakan pagelaran seni budaya dari tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dikaitkan dengan ranah pendidikan (keterlibatan siswa) sebagai sumber belajar.	Pemahaman generasi muda/terkini terhadap budaya lokal dan nasional semakin menguat.
3.	Menguatkan titik temu antara dinas kebudayaan dan dewan kesenian.	Terwujudnya peningkatan konsolidasi pemangku kepentingan kebudayaan dewan kesenian di seluruh Indonesia.
4.	Mengonservasi nilai-nilai kearifan lokal dan menyelenggarakan festival budaya secara berjenjang.	Terjadinya pelestarian dan revitalisasi budaya lokal.
5.	a. Mengangkat kurator kebudayaan. b. Memperbanyak lembaga pendidikan kebudayaan (Misal: SMK Kesenian). c. Melibatkan publik dan dunia swasta dalam mendukung penyelenggaraan acara pertunjukan dan festival.	Meningkatnya atensi pemerintah daerah terhadap kebudayaan lokal.

6. Konservasi dan revitalisasi bahasa daerah dan sastra daerah

No.	Rencana Aksi	Target
1.	a. Menciptakan kamus bahasa ibu/bahasa daerah ke Bahasa Indonesia. b. Membuat kegiatan literasi dalam kegiatan ekstrakurikuler.	Terjadinya peningkatan pemahaman generasi muda/terkini terhadap sastra daerah melalui budaya literasi.
2.	a. Meningkatkan pendidikan bahasa dan sastra daerah di sekolah. b. Membuat regulasi (tentang pendidikan bahasa daerah). c. Menyusun rancangan penyelenggaraan festival temu sastra etnik atau daerah.	Penggunaan bahasa dan sastra daerah yang lebih intensif oleh kalangan generasi muda.
3.	a. Menyusun penulisan bahasa daerah di tempat-tempat strategis. b. Menyosialisasikan penggunaan bahasa daerah melalui media cetak dan elektronik.	Optimalisasi peran dan sosialisasi balai bahasa/kantor bahasa di daerah.
4.	a. Menetapkan hari berbahasa daerah (regulasi). b. Menggalakkan penggunaan bahasa daerah di <i>event-event</i> tradisi. c. Meningkatkan peran orangtua dalam menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi keluarga.	Peningkatan rasa kebanggaan dan rasa memiliki terhadap bahasa daerah.

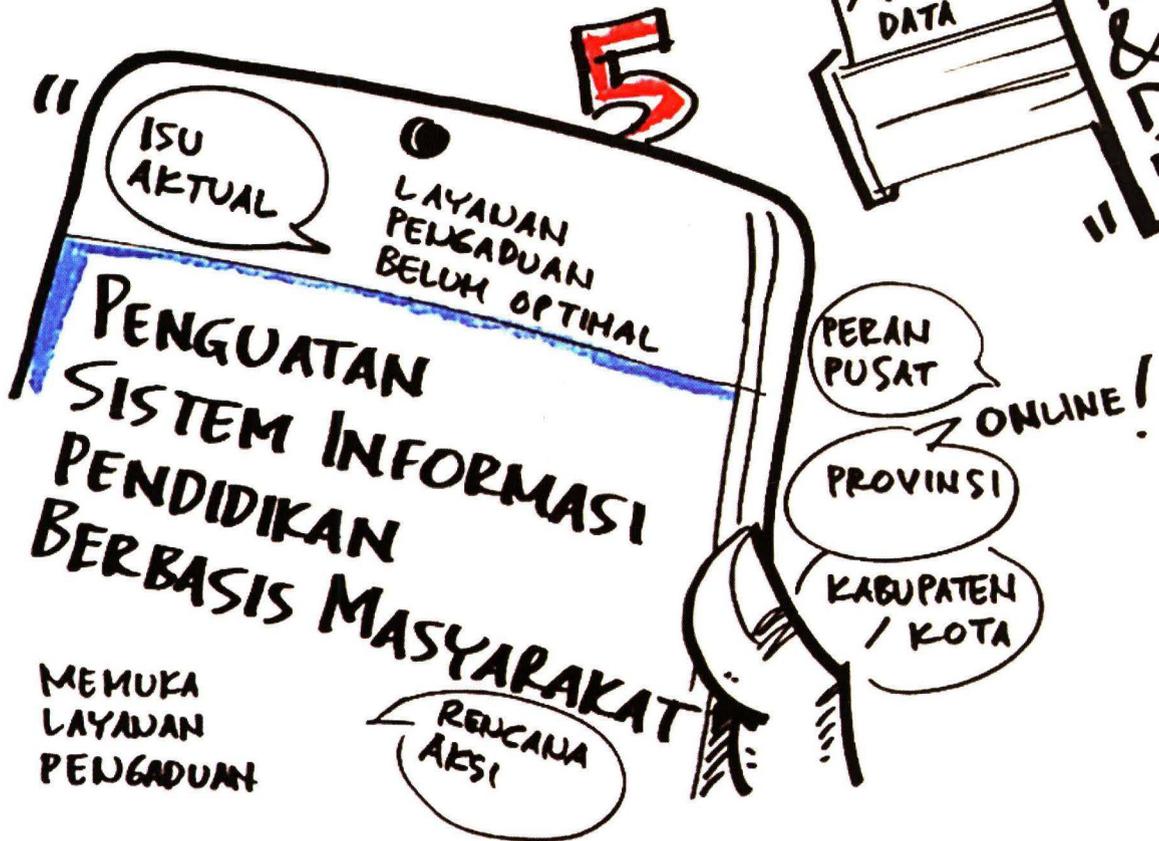
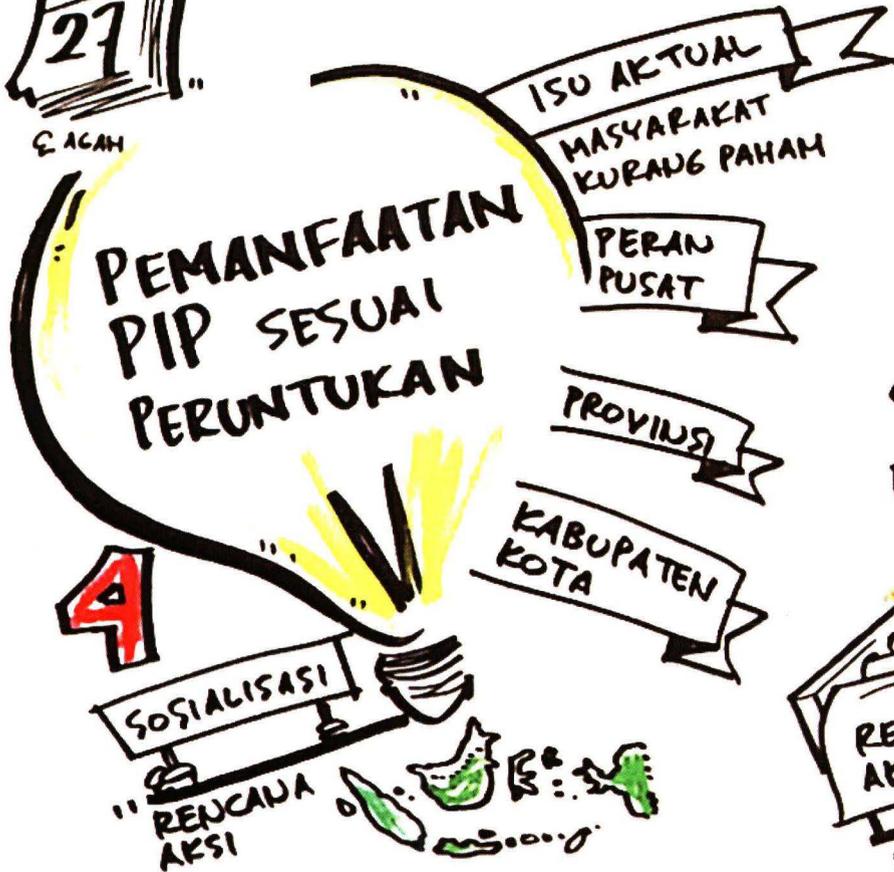


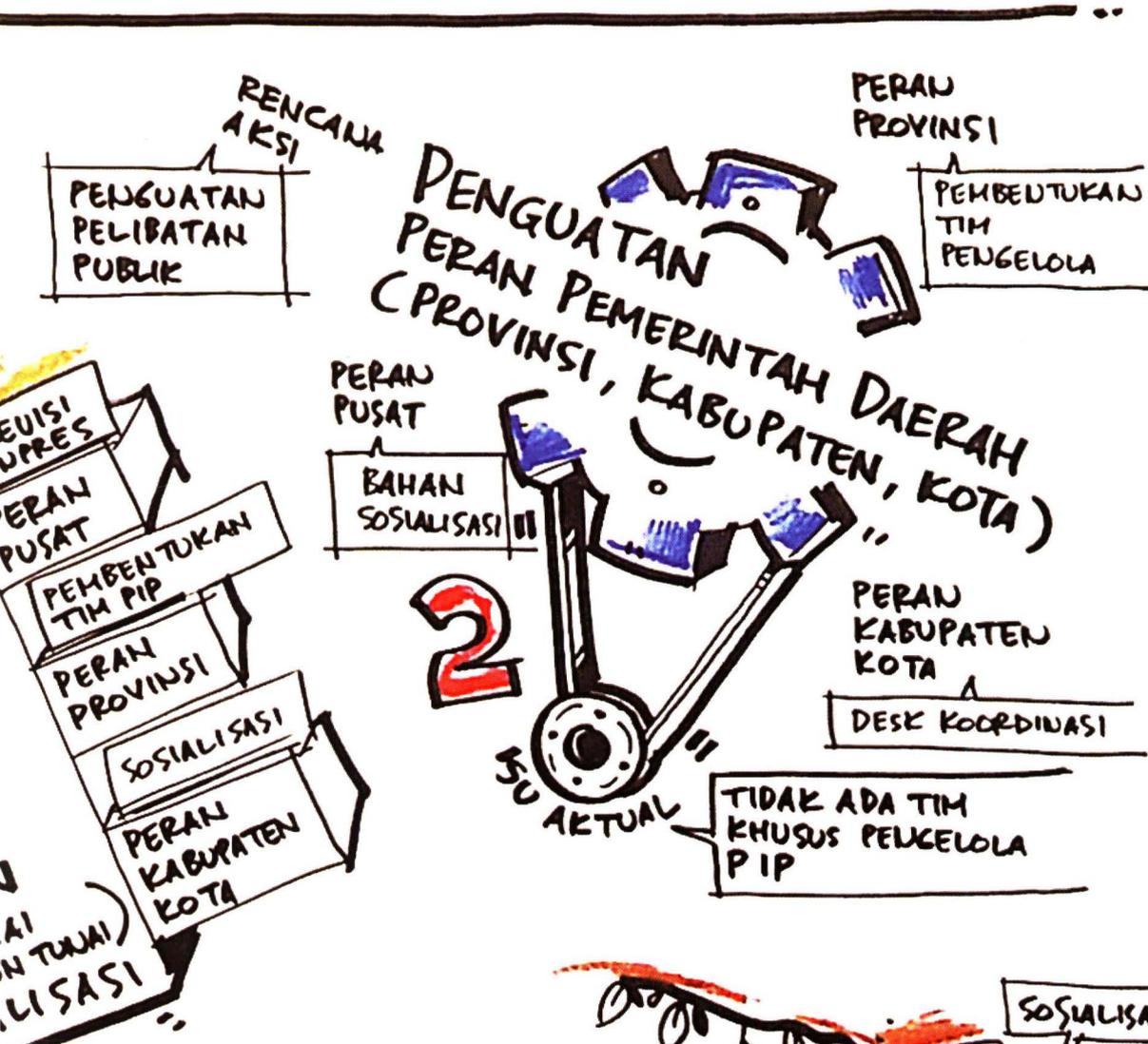
GGD merupakan kebijakan afirmasi Kemendikbud melalui penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta usulan daerah. Calon GGD mesti lebih dulu lulus program pendidikan profesi guru (PPG) Prajabatan.





HASIL DISKUSI







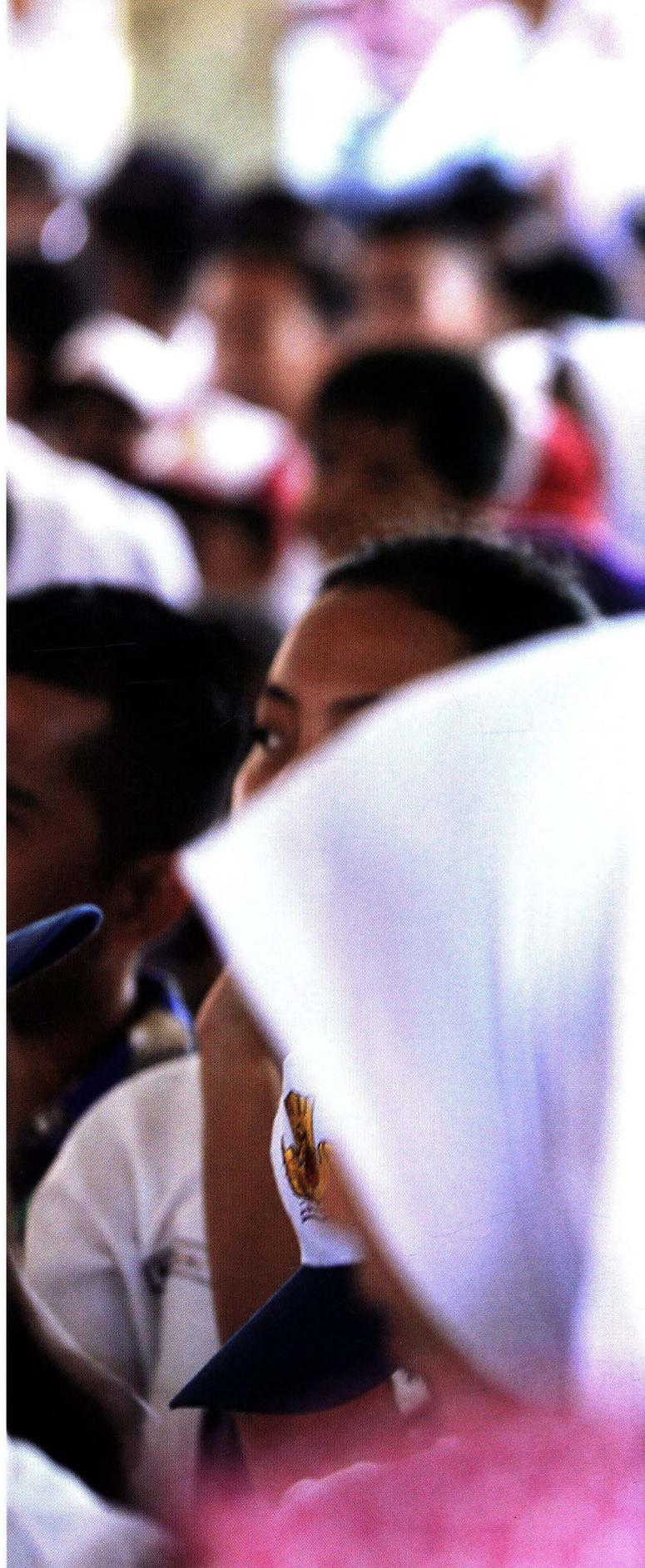
5

**PENDIDIKAN
BERKUALITAS**

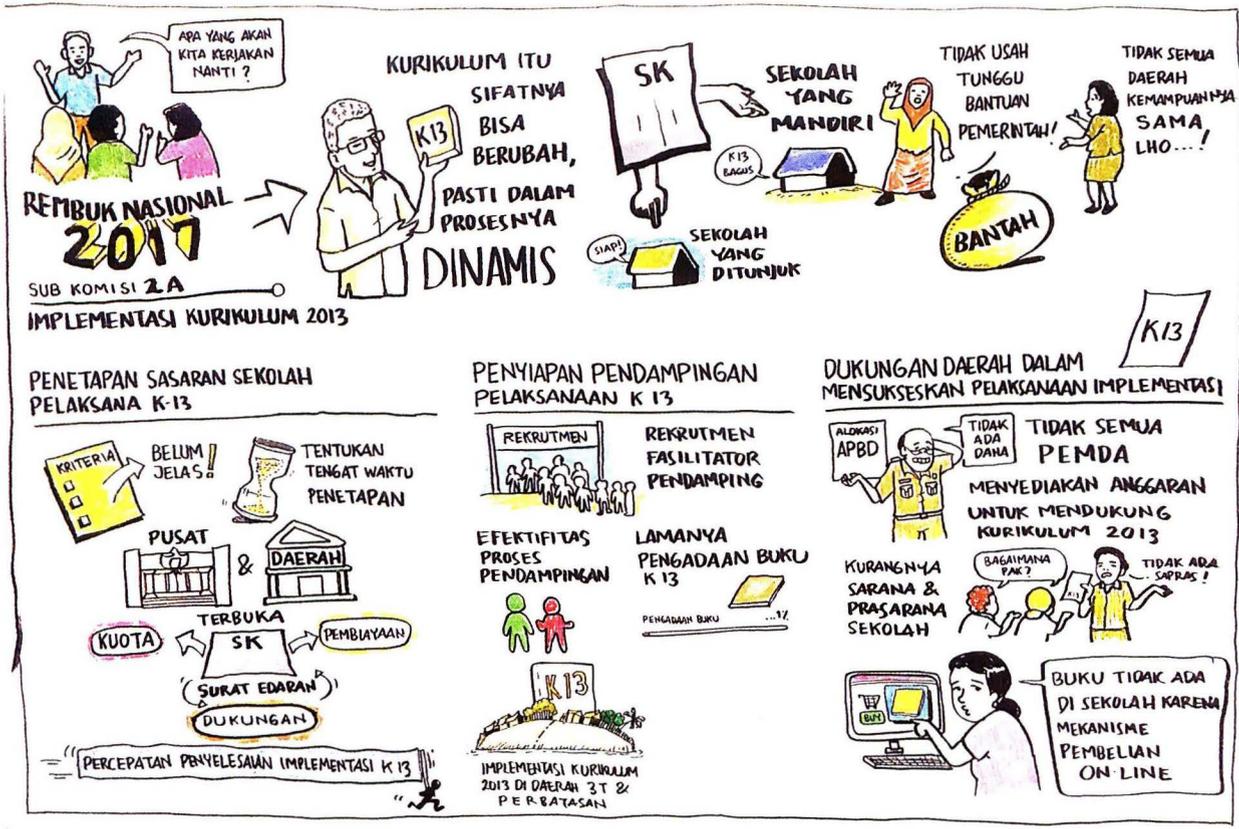
P

ENINGKATAN mutu pendidikan menjadi salah satu isu yang dielaborasi dalam sidang Komisi 2 di gelaran RNPk 2017, Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Kamis (26/1). Komisi serupa juga menyoroti topik pendidikan karakter serta upaya meningkatkan daya saing bangsa.

Untuk membahas isu-isu tersebut, Komisi 2 dibagi menjadi dua subkomisi. Subkomisi 2A ber-sidang mengenai realisasi Kurikulum 2013. Utamanya, bagaimana implementasi kurikulum itu bisa menciptakan harmonisasi antara dokumen kurikulum, praktik pembelajaran, dan hasil belajar.



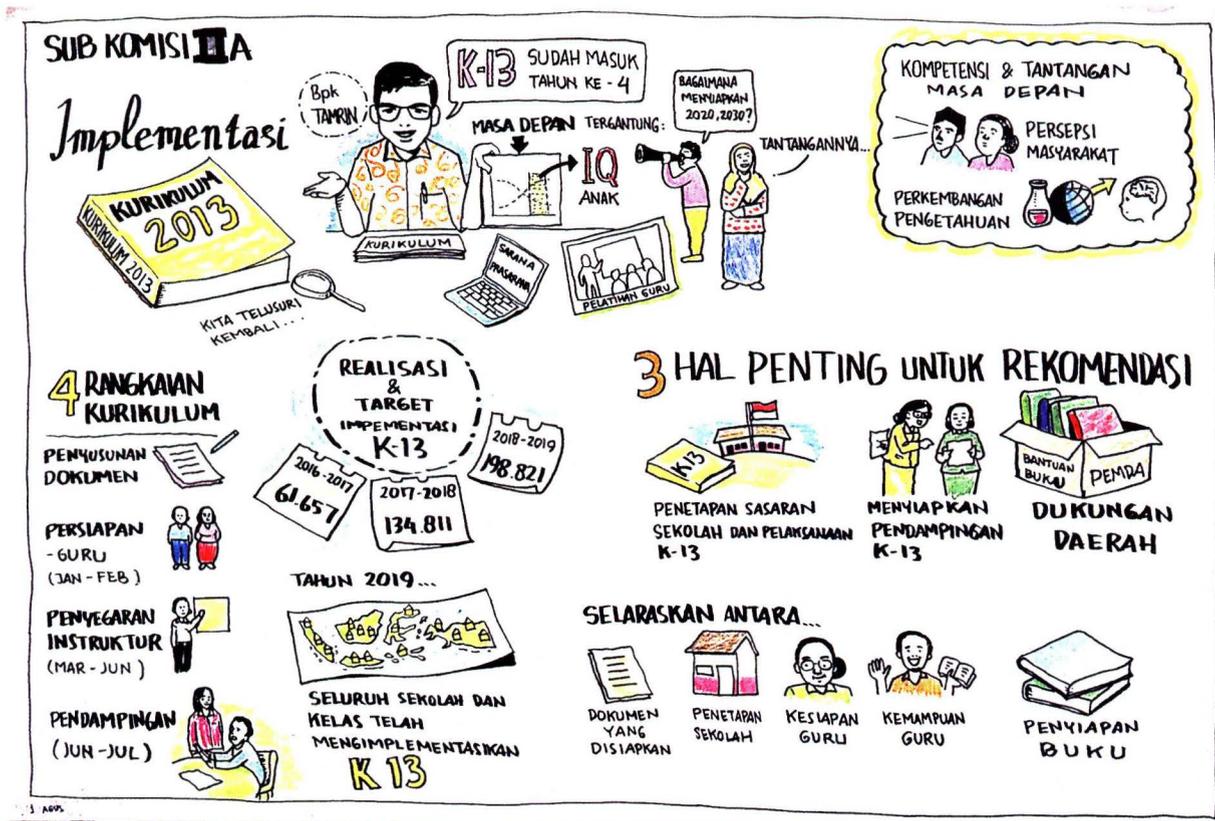




Subkomisi 2A Implementasi Kurikulum 2013

1. Penetapan sasaran sekolah pelaksana Kurikulum 2013

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Menerbitkan surat edaran tentang dukungan implementasi Kurikulum 2013.	Terbitnya surat edaran dari pusat yang berisi permintaan dukungan dari pemda untuk implementasi Kurikulum 2013.
2.	Menyusun prosedur dan mekanisme Koordinasi antara LPMP dan Pemda.	Terwujudnya mekanisme/koordinasi penetapan sekolah sasaran yang intensif antara LPMP dan disdik provinsi/kabupaten/kota.
3.	Membuat surat edaran bagi yang akan mengajukan sekolah pelaksana kurikulum 2013 pada tahun 2018 sesuai dengan standar/kriteria yang ditetapkan.	Realisasi percepatan penyelesaian implementasi Kurikulum 2013 terkait dengan belum dipahaminya secara jelas kriteria penetapan sasaran sekolah pelaksana Kurikulum 2013.
4.	a. Menetapkan hari berbahasa daerah (regulasi). b. Menggalakkan penggunaan bahasa daerah di event-event tradisi. c. Meningkatkan peran orang tua dalam menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi keluarga.	Terwujudnya peningkatan rasa kebanggaan dan rasa memiliki bahasa daerah.



2. Penyiapan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Menambahkan kriteria dalam rekrutmen selain nilai UKG, seperti: pengalaman sebagai fasilitator, guru berprestasi, dan lain-lain.	Terekrutnya fasilitator pendamping pelaksanaan Kurikulum 2013 yang berpengalaman sebagai fasilitator, guru berprestasi, dan kriteria baik lainnya.
2.	Mendorong Pengawas Sekolah untuk melakukan pengawasan dan monev di kabupaten/kota dan LPMP.	Terwujudnya pengawasan dan monev yang efektif oleh Pengawas Sekolah.
3.	Menyosialisasikan mekanisme pengadaan buku oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.	Tersedianya buku-buku Kurikulum 2013 di sekolah pelaksana.
4.	Merencanakan program afirmasi pelaksanaan Kurikulum 2013 di daerah 3T dan perbatasan.	Terimplementasinya Kurikulum 2013 di daerah 3T dan perbatasan.

3. Dukungan daerah dalam menyukseskan pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 (pelatihan, sarana, prasarana dan penyediaan buku)

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Menerbitkan surat edaran untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013.	Tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh pemerintah daerah.
2.	Melengkapi sarana dan prasarana di sekolah pelaksana Kurikulum 2013 secara bertahap.	Tersedianya sarana prasarana sekolah dalam menerapkan Kurikulum 2013.
3.	Menyosialisasikan mekanisme pengadaan buku untuk sekolah pelaksana oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.	Tersedianya buku Kurikulum 2013 di sekolah melalui mekanisme pembelian daring (<i>online</i>).



KOMISI 2 | 8



Sementara itu, pendidikan karakter menjadi isu yang dibahas dalam diskusi Subkomisi 2B. Lingkungan dianggap menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan karakter para anak

didik. Oleh karena itu, kecakapan sekolah dalam mempersiapkan metode pendidikan karakter, pelibatan peran publik dan keluarga, menjadi hal-hal yang diperbincangkan oleh subkomisi tersebut.

Sub Komisi 2B

Penguatan Pendidikan Karakter

1. Penguatan kapasitas dan mutu pembelajaran kelas (guru, sarpras, metode).

No.	Rencana Aksi	Target
1.	<ol style="list-style-type: none">Memberdayakan forum MGMP/KKG untuk melakukan FGD tentang integrasi PPK dalam materi pembelajaran.Supervisi oleh Pengawas dan Kepala Sekolah dalam pembelajaran di kelas secara berkelanjutan.Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru.	Terintegrasinya nilai-nilai PPK dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh guru.
2.	Membina guru agar dapat selalu menjadi <i>role model</i> bagi siswa (disiplin, jujur, rapi, semangat, senyum dan ceria, bersih, sejuk, dan menyenangkan).	Terbinanya guru-guru yang mampu memberikan keteladanan/ccontoh perilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter, baik di dalam maupun luar kelas.
3.	<ol style="list-style-type: none">Menyediakan dan menata ruang kelas.Melengkapi bahan-bahan dan media pembelajaran di dalam kelas berbasis kearifan lokal.	Terbenahnya sarana dan prasarana kelas.
4.	<ol style="list-style-type: none">Meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif.Menyesuaikan metode yang bervariasi dengan materi pembelajaran (contoh: pembelajaran sejarah dengan sosiodrama).Memanfaatkan kearifan lokal sebagai metode pembelajaran (contoh: permainan tradisional dan kerajinan lokal).Melibatkan pelaku budaya/seniman masuk kelas (sesuai peraturan sekolah, penampilan, bahasa).	Tersedianya variasi metode pembelajaran yang sudah mendukung pelaksanaan PPK.

2. Penumbuhan budaya dan *branding* sekolah.

No.	Rencana Aksi	Target
1.	<ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan diklat PPK.Menyelenggarakan forum evaluasi guru dan tenaga kependidikan.Memberikan apresiasi kepada guru yang melakukan keteladanan.	Terjadinya peningkatan keteladanan GTK di sekolah.
2.	Menyosialisasikan kepada internal dan eksternal perihal pemberian sanksi tegas atas pelanggaran peraturan sekolah.	Terpatuhinya peraturan sekolah.
3.	<ol style="list-style-type: none">Mengimplementasikan peraturan yang berkelanjutan.Melakukan harmonisasi keteladanan setiap hari di sekolah.Melaksanakan kegiatan intra/ko-kurikuler/ekstrakurikuler dan berkesenian (pramuka/baris berbaris/salam) di sekolah.Mengunjungi museum dan tempat-tempat budaya.Menyusunan buku-buku muatan lokal berbasis kearifan lokal.	Terwujudnya peningkatan pembudayaan PPK di sekolah.

3. Peningkatan kapasitas dan pelibatan publik (lembaga seni, budaya, bahasa, PT DUDI, ikatan alumni, organisasi profesi, komunitas, dan pegiat pendidikan) dalam mendukung aktivitas belajar di sekolah dan luar sekolah

No.	Rencana Aksi	Target
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam membaca faktor eksternal dan internal. b. Meningkatnya inovasi dan kreativitas kepala sekolah dalam membangun jejaring kemitraan dengan lembaga lain. c. Meningkatnya dukungan dan partisipasi lembaga untuk sekolah dalam mendukung pendidikan karakter. 	Terwujudnya penguatan peran kepala sekolah dalam membangun jejaring pelibatan publik untuk mendukung aktivitas belajar di sekolah dan luar sekolah.
2.	Meningkatnya dukungan dan partisipasi lembaga untuk sekolah dalam mendukung pendidikan karakter.	Terwujudnya peningkatan dukungan publik terhadap kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan nonkurikuler.

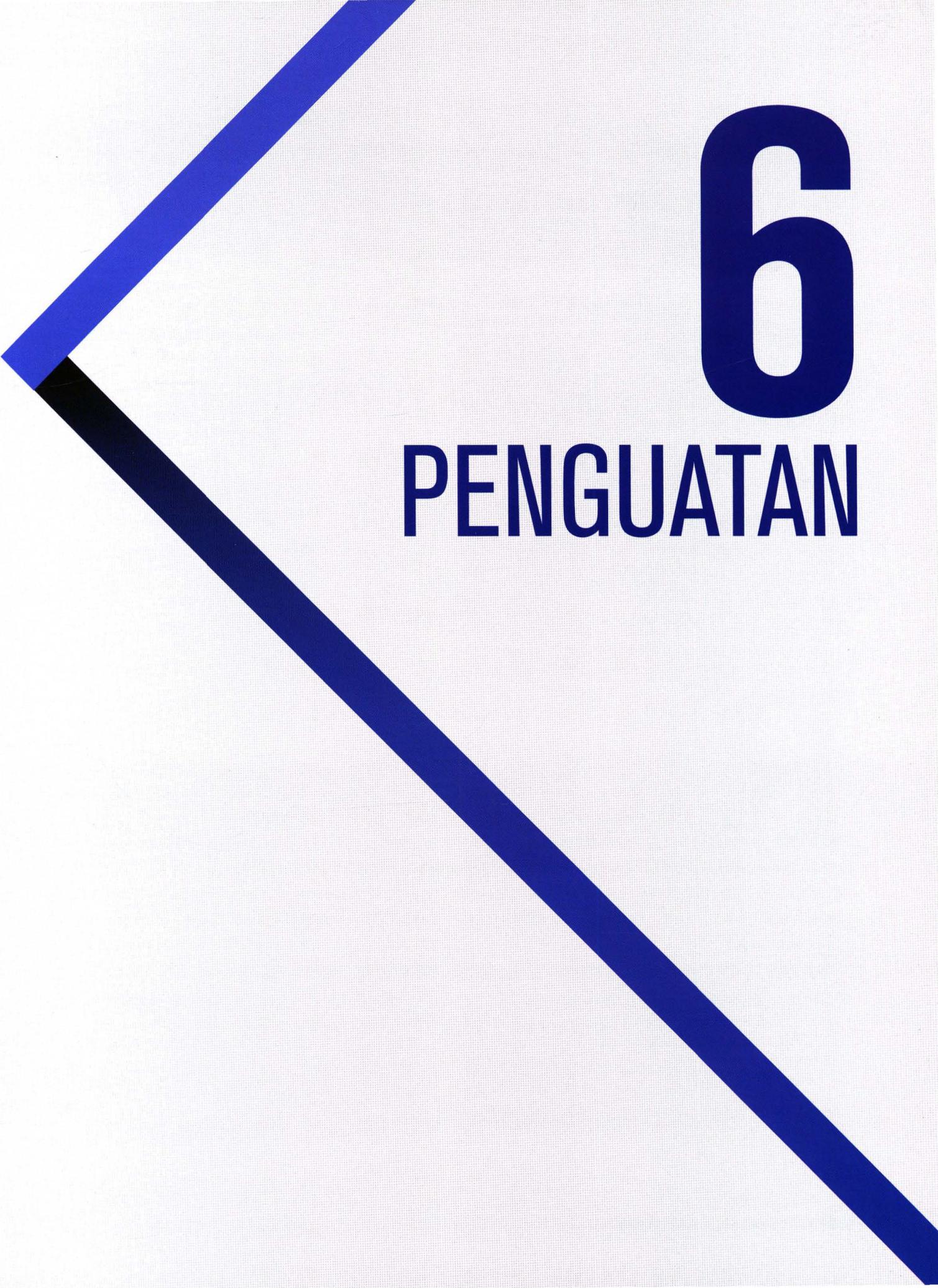
4. Peningkatan peran keluarga dalam PPK

No.	Rencana Aksi	Target
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguatkan pemahaman keluarga bahwa pendidikan karakter selama berada di sekolah merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah. b. Menguatkan pemahaman keluarga dan masyarakat akan kebijakan 5 hari sekolah. 	Terjadinya penguatan peran keluarga dalam rangka pelaksanaan kebijakan 5 hari sekolah dengan memperhatikan keberagaman daerah.
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan keteladanan orang tua dalam keluarga. b. Meningkatkan kepedulian orang tua dan masyarakat. 	Peran keluarga semakin kuat dalam mendukung upaya penguatan pendidikan karakter.

5. Pengembangan literasi sebagai bagian dari PPK

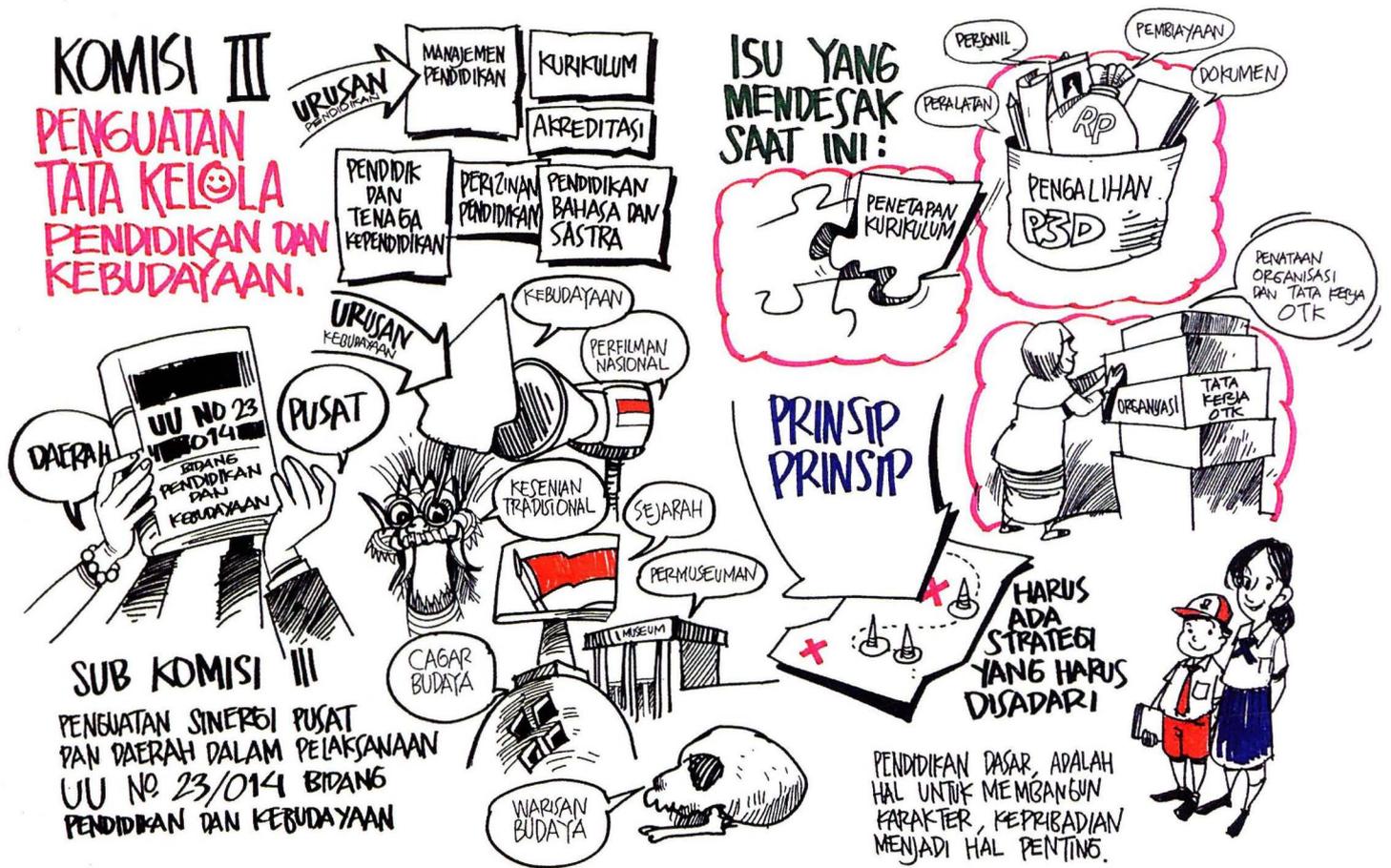
No.	Rencana Aksi	Target
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggiatkan gerakan literasi (literasi baca tulis, literasi berhitung/numerik, literasi sains, literasi keuangan, literasi TIK, literasi kebudayaan dan kewarganegaraan yang didukung oleh pemerintah serta masyarakat). b. Memberikan dukungan terhadap apresiasi dan lomba literasi. 	Terwujudnya gerakan literasi pada masyarakat secara masif dengan dukungan pemerintah.





6

PENGUATAN



R

ENCANA pemerintah untuk mendorong revitalisasi sektor pendidikan dan kebudayaan memerlukan fundamental kuat. Oleh karenanya, penguatan tata kelola pada sektor tersebut menjadi salah satu materi penting yang dieksplorasi dalam sidang Komisi 3.

Dalam praktiknya, sidang Komisi 3 yang berlangsung pada RNPk 2017 di Pusdiklat Kemendik-

bud, Sawangan, Kamis (26/1) dipilah menjadi Subkomisi 3A dan Subkomisi 3B.

Subkomisi pertama membahas perihal pendekatan untuk memperkokoh kolaborasi antara pusat dan daerah terkait dalam koridor Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penguatan sinergi tersebut bisa terjadi ketika setiap pihak memahami wewenang, hak dan kewajiban masing-masing terkait bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sub Komisi 3.A

Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU No. 23/2014 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Ketuntasan pengalihan aset

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Memverifikasi dan memvalidasi aset pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota yang akan dialihkan kepada provinsi.	Teralihkannya semua aset pendidikan dan kebudayaan yang dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
2.	Menghapus aset pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota.	Terwujudnya serah-terima semua data aset pendidikan dan kebudayaan pemerintah kabupaten/kota yang telah dihapus kepada pemerintah provinsi.

2. Ketuntasan pengalihan personil

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Mempercepat penetapan status seluruh ASN pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota yang dialihkan kepada provinsi.	Tuntasnya proses penetapan status seluruh ASN pendidikan dan kebudayaan yang dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.
2.	Mempercepat status pembiayaan Guru dan Tenaga Honoror lainnya (Non-PNS) kabupaten/kota yang telah dialihkan kepada provinsi.	Tuntasnya proses penetapan status pembiayaan guru dan tenaga Honoror (Non-PNS) yang dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

3. Ketuntasan pengalihan pembiayaan (anggaran)

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Memberikan dukungan anggaran terhadap APBD provinsi yang tidak mampu menyediakan biaya operasional pendidikan dan kebudayaan.	Tersedianya anggaran untuk mendukung biaya operasional pendidikan dan kebudayaan (dekonsentrasi) oleh pemerintah pusat.

4. Ketuntasan pengalihan dokumen

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Memverifikasi dan memvalidasi dokumen pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota yang dialihkan kepada provinsi.	Tuntasnya proses penerimaan semua dokumen pendidikan dan kebudayaan yang dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

Dari Hulu hingga Hilir

BAGAIMANA pemerintah daerah membangun bidang pendidikan dan kebudayaan yang terintegrasi mulai dari hulu, tengah dan hilir? Bupati Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta pun berbagi pengalaman dalam Sidang Subkomisi 3A.

Kabupaten yang ada di Pulau Dewata itu memang sudah memasang target untuk mendorong pemerataan pendidikan. Bukan sekadar merata, tapi juga berkualitas. Hal tersebut menurutnya sudah menjadi pakem kebijakan pemerintah kabupaten periode 2016-2021.

Di sisi hilir, misalnya, pemerintah kabupaten terus menggiatkan program Wajib Belajar 12 tahun guna meningkatkan akses anak terhadap pendidikan, di samping menambah ruang kelas baru (RKB) maupun pengadaan sekolah inklusif.

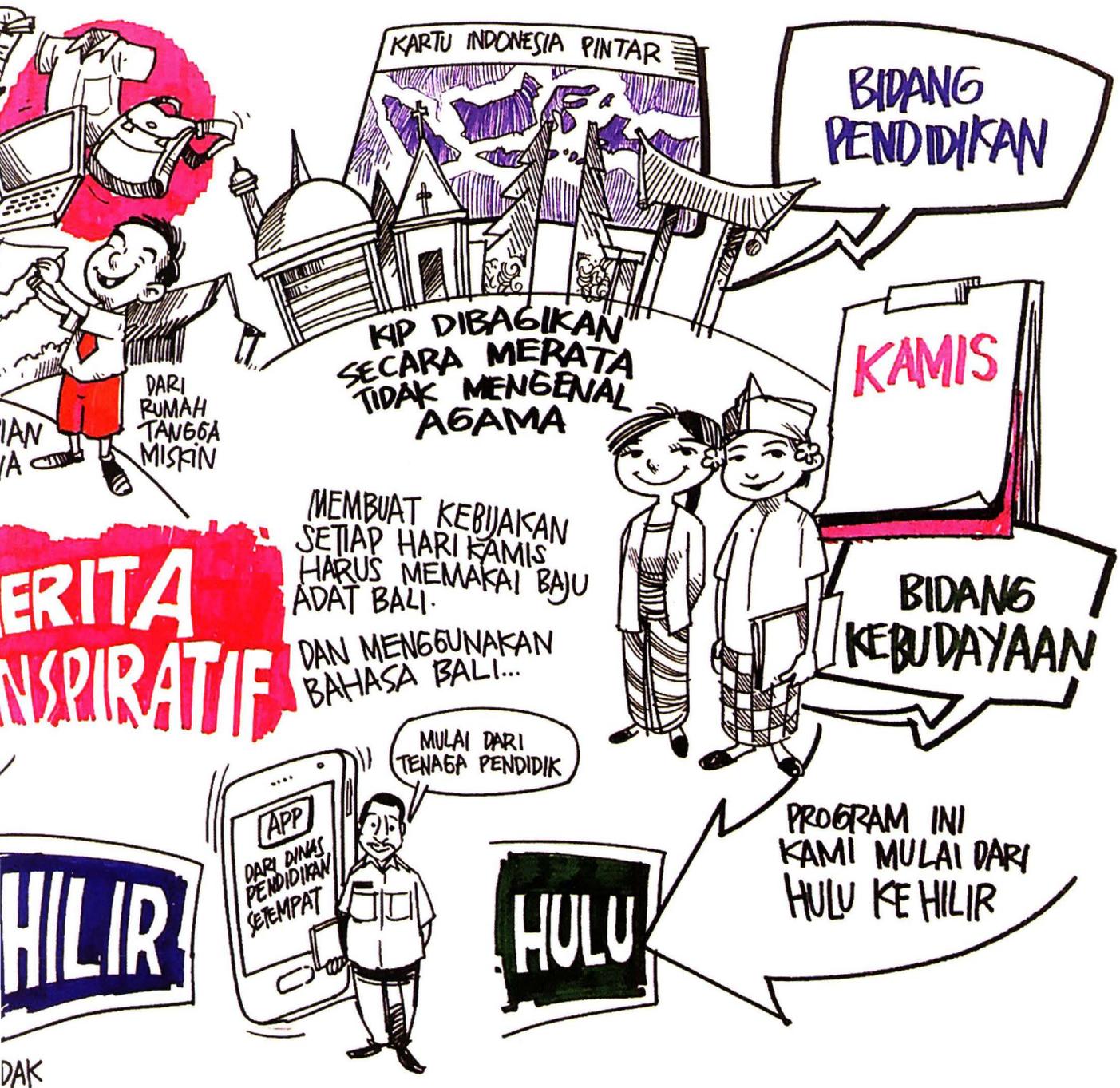
Target pemerataan juga dikonkretkan lewat pendidikan gratis dalam Wajar 9 Tahun, pengadaan beasiswa, dan pemberian seragam bagi siswa-siswi baru SD kelas I dan SMP kelas VII. Langkah-langkah di sisi hilir tersebut dijalankan untuk mengurangi risiko anak putus sekolah.

Adapun peningkatan kualitas pendidikan, terutama yang berkaitan dengan kemahiran penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain didukung dengan penyediaan fasilitas 8.950 laptop bagi siswa SD kelas V dan VI. Laptop dilengkapi dengan aplikasi pembelajaran sejalan dengan cita-cita mewujudkan *e-learning system*. Sementara untuk para siswa jenjang SMP, dibangun laboratorium-laboratorium komputer.



Sejalan dengan pemahaman agar nilai-nilai keunggulan dan kecerdasan lokal mendapat ruang sebesar-besarnya dalam pendidikan karakter, pemerintah Kabupaten Badung memberi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan. Penguatan tersebut terutama pada elemen pendidikan seni, sastra dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali.

“Umpamanya, siswa berpakaian dan berbahasa Bali setiap hari Kamis,” tuturnya.



Masyarakat pun menurutnya diikuti-takan untuk mengawal soliditas nilai-nilai setempat melalui penguatan lembaga yang ada di desa adat.

Di sisi hulu, pemerintah kabupaten berupaya memastikan kecakapan dan kesejahteraan guru terjaga. Dilakukanlah antara lain pemberian tunjangan beban kerja maupun tunjangan profesi. "Orang hebat hanya mampu menghasilkan beberapa karya ber-

mutu. Insan pendidikan yang bermutu akan menghasilkan orang-orang yang hebat," kata Nyoman.

Berbagai fasilitas dan program yang dilaksanakan, lanjutnya, dimungkinkan dengan adanya kebijakan politik anggaran yang pro-pendidikan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Badung menyisihkan 20% dari APBD-nya untuk sektor pendidikan dan kebudayaan.

Sementara itu, Subkomisi 3B mengulas isu penguatan kelembagaan dan tata kelola satuan pendidikan dan kebudayaan.

Pengadaan sistem zonasi sekolah menjadi salah satu bahasan subkomisi tersebut. Penggunaan nilai ujian nasional (UN) yang berlaku pada sistem sekarang dikhawatirkan telah melahirkan fenomena 'sekolah favorit'. Alhasil, kualitas sekolah menjadi tidak merata. Kelak, keberadaan sistem zonasi yang tentunya memerlukan dukungan komitmen

pemerintah daerah, diharap dapat mengikis fenomena tersebut.

Pembentukan Komite Sekolah adalah topik lain yang dibahas Subkomisi 3B. Saat ini, payung hukumnya pun sudah ada melalui Peraturan Mendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Subkomite ini juga membicarakan tentang transparansi dalam pembiayaan satuan pendidikan dan kebudayaan dengan mempertimbangkan Neraca Pendapatan Daerah sebagai bahan informasi.

Sub Komisi 3.B

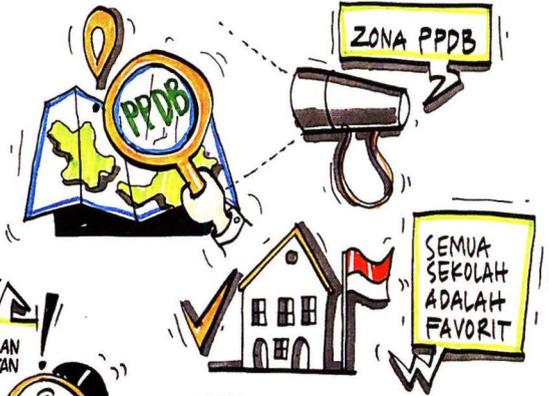
Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Satuan Pendidikan dan Kebudayaan

1. Revitalisasi fungsi Komite Sekolah (Permendikbud No.75 Tahun 2016)

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Menyosialisasikan fungsi Komite Sekolah dan definisi tegas antara pungutan, sumbangan dan bantuan sesuai Permendikbud No.75 Tahun 2016.	Terpahaminya tugas dan fungsi Komite Sekolah serta perbedaan nomenklatur pungutan, sumbangan dan bantuan dengan tegas oleh pemangku kepentingan.
2.	Memberikan rekomendasi pencairan Dana BOS kepada sekolah yang Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)-nya telah tuntas dan lulus verifikasi.	Terbimbingnya Pimpinan Sekolah dan Komite Sekolah yang dapat merencanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan Dana BOS yang diterima/dikelola sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
3.	Menerbitkan petunjuk teknis yang memuat format pola penyusunan perencanaan dan pertanggungjawaban RAPBS/RKAS serta format laporan Komite Sekolah.	Terbimbingnya Pimpinan Sekolah dan Komite Sekolah yang dapat merencanakan & mempertanggungjawabkan RKAS/RAPBS yang transparan, akuntabel, dan diterima oleh pemangku kepentingan sekolah.
4.	Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan serta Pemanfaatan Dana BOS.	Terbentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan serta Pemanfaatan Dana BOS di kabupaten/kota.
5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyosialisasikan substansi perubahan ketentuan Komite Sekolah dalam Permendikbud No.75 Tahun 2016 secara berjenjang. b. Menerbitkan surat edaran agar pemerintah daerah dan masyarakat memperhatikan Permendikbud No.75 Tahun 2016. c. Menerbitkan Surat Keputusan Bersama/ Surat Edaran/Dokumen Pendukung antara Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenag agar pemerintah daerah menaati Permendikbud No.75 Tahun 2016. d. Pemerintah daerah membuat Perda berdasarkan Permendikbud No.75 Tahun 2016. e. Menyiapkan instrumen sosialisasi Permendikbud No.75 Tahun 2016 berbentuk infografis yang mudah dipahami masyarakat. f. Memanfaatkan media elektronik dan media sosial untuk sosialisasi Permendikbud No.75 Tahun 2016. 	Terpahaminya dan terimplementasikannya Permendikbud No.75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

KOMISI III
PENGUATAN TATA KELOLA PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

SUB KOMISI B
 PENGUATAN KELEMBAGAAN & TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN



ZONA PPDB

SEMUA SEKOLAH ADALAH FAVORIT

ANGGARAN PENDIDIKAN TIDAK LBH DR 20%

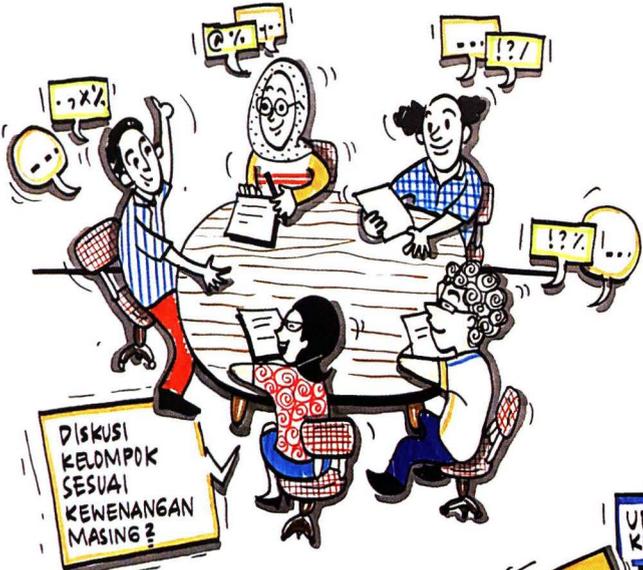


PEMERINTAH DAERAH



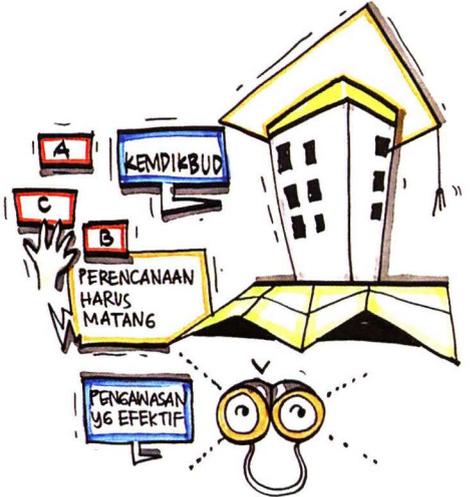
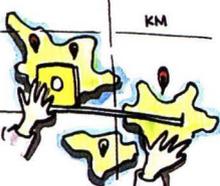
FASILITAS SEKOLAH

PERMENDIKBUD NO 75 TH 2016



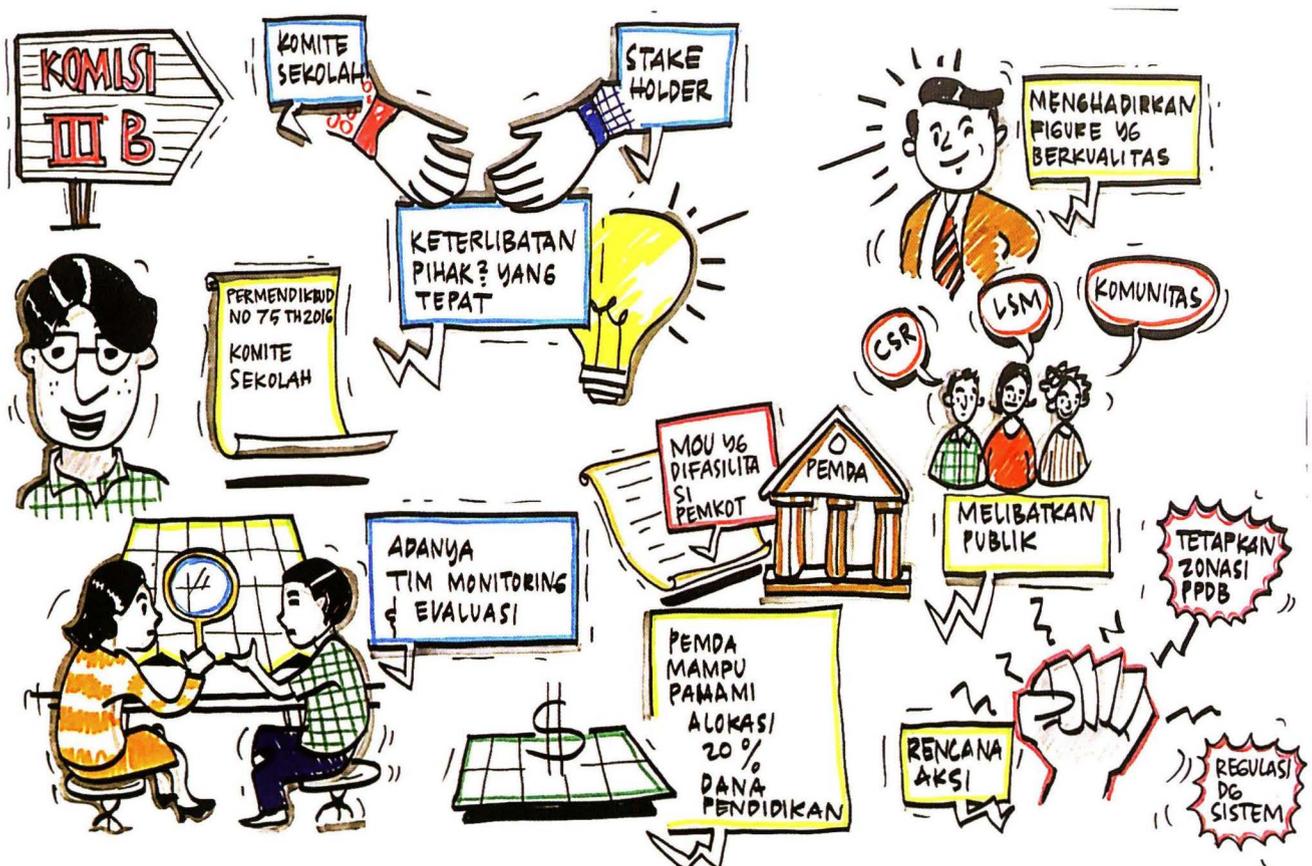
DISKUSI KELOMPOK SESUAI KEWENANGAN MASING-MASING?

PEMBAGIAN WILAYAH BERDASAR JARAK TERDEKAT



2. Zonasi satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Menetapkan kriteria Zonasi dalam PPDB: pembagian wilayah PPDB berdasarkan jarak geografis, domisili peserta didik, ketersediaan daya tampung sekolah secara merata, berkeadilan, dan bermutu.	Terpahaminya definisi dan kriteria Zonasi dalam PPDB oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
2.	a. Menerbitkan regulasi dari pemerintah pusat perihal PPDB yang menggunakan sistem Zonasi. b. Menerbitkan Petunjuk Teknis dari pemerintah daerah perihal pelaksanaan PPDB berbasis Zonasi.	Tersosialisasikannya Zonasi untuk PPDB masing-masing oleh pemerintah daerah yang siap menetapkan ketentuan tersebut.
3.	Membuat Nota Kesepahaman (MoU) yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait penetapan Zonasi lintas kabupaten/kota/provinsi.	Tersekatapinya penetapan Zonasi untuk PPDB lintas kabupaten/kota/provinsi.
4.	Menyosialisasikan peraturan PPDB --pelaksanaan PPDB pada Juli 2017-- secara berjenjang baik kepada pemangku kebijakan maupun masyarakat.	Tersosialisasinya peraturan PPDB dengan kriteria Zonasi pada Juli 2017.
5.	Membentuk Tim Pengawas, baik internal (pihak sekolah dan pemerintah daerah) maupun eksternal (dewan pendidikan dan pemerhati pendidikan).	Terlaksananya pengawasan PPDB berdasarkan kriteria Zonasi oleh Tim Pengawas secara efektif.

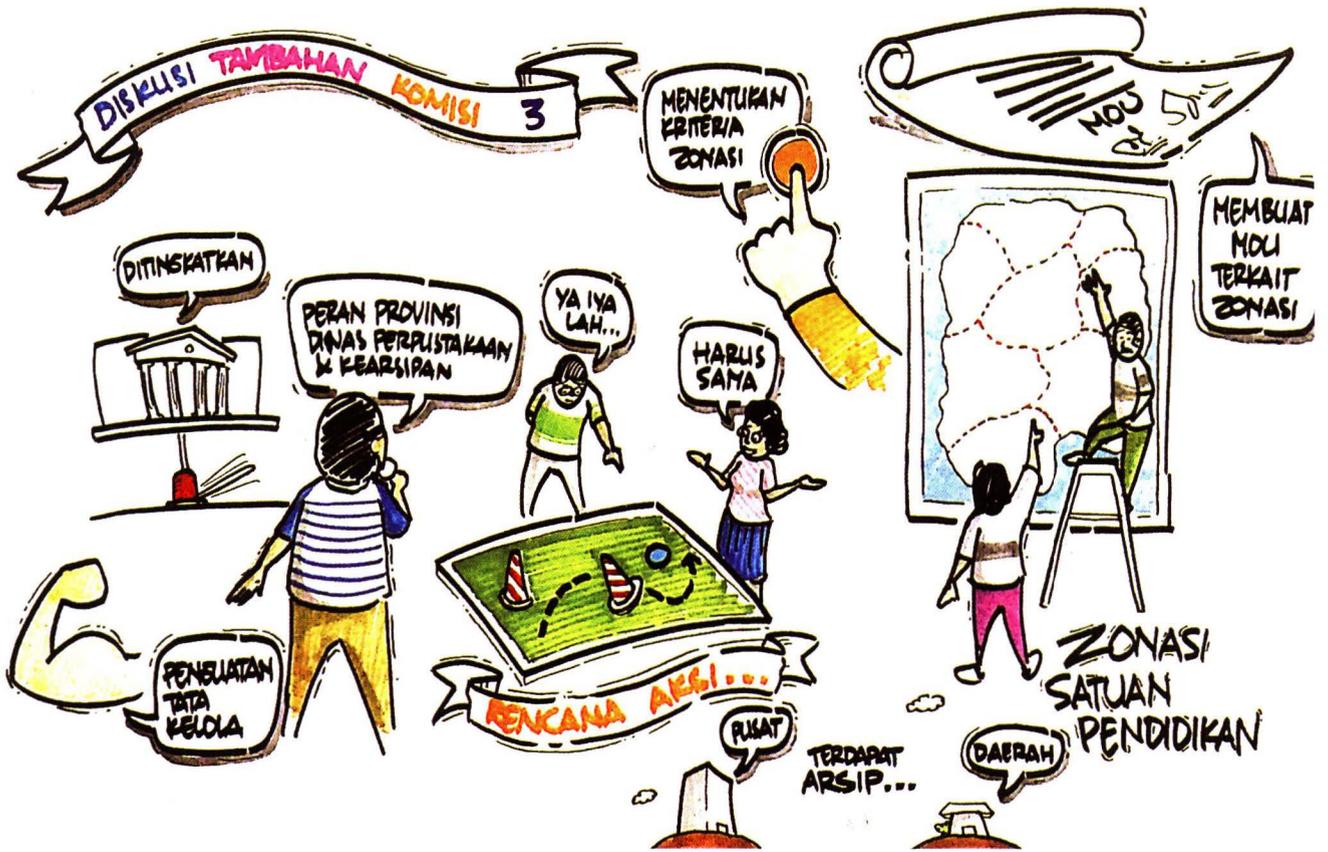


3. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan satuan pendidikan dan lembaga kebudayaan

No.	Rencana Aksi	Target
1.	<p>a. Menyinkronisasikan regulasi dengan Kemendagri untuk harmonisasi anggaran urusan pendidikan.</p> <p>b. Menyosialisasikan NPD kepada seluruh pemda.</p>	<p>a. Dimanfaatkannya Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan anggaran urusan pendidikan daerah.</p> <p>b. Teralokasikannya 20% APBD untuk urusan pendidikan di luar dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk untuk gaji GTK oleh pemerintah daerah.</p>
2.	<p>Memprioritaskan pendidikan, dalam bentuk:</p> <p>a) Rencana Strategis</p> <p>b) Peraturan Daerah</p> <p>c) Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota</p> <p>d) Pakta Integritas DPRD.</p>	<p>Terprioritaskannya pendidikan di dalam Renstra, Perda, Pergub, Perbup, Perwal, dan Pakta Integritas DPRD oleh pemerintah daerah.</p>
3.	<p>Penghargaan (<i>reward</i>) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan DPRD yang berhasil mengalokasikan 20% APBD non-Dana Transfer dari pemerintah pusat untuk urusan pendidikan.</p>	<p>Pengalokasian anggaran 20% APBD non-Dana Transfer dari pemerintah pusat untuk urusan pendidikan sesuai PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan oleh pemerintah daerah.</p>
4.	<p>Mendata potensi budaya yang ada di daerah masing-masing dan mengomunikasikannya dengan pemangku kebudayaan oleh pemerintah daerah.</p>	<p>Terdatanya potensi budaya kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan divalidasi pemangku kebudayaan di daerah.</p>
5.	<p>Memperkuat lembaga kebudayaan oleh pemerintah daerah.</p>	<p>Terbinanya dan terfasilitasinya lembaga kebudayaan dari pemerintah daerah.</p>
6.	<p>Mendorong berbagai kegiatan kebudayaan dalam pendidikan di sekolah oleh pemerintah daerah.</p>	<p>Terwujudnya kegiatan kebudayaan di sekolah bersama proses belajar dan mengajar.</p>
7.	<p>Mendorong pemerintah daerah untuk mengembalikan urusan kebudayaan melekat dengan urusan pendidikan.</p>	<p>Berpadunya urusan kebudayaan dalam SKPD urusan pendidikan.</p>
8.	<p>Pemerintah daerah:</p> <p>a. Menyiapkan perda soal pengalokasian dana urusan pendidikan 20% non dana transfer dari pemerintah pusat, dan</p> <p>b. Menyiapkan anggaran untuk pembiayaan urusan pendidikan, minimal 20%, dalam RPJMD.</p>	<p>Pengalokasian anggaran urusan pendidikan minimal sebesar 20% non-Dana Transfer dari pemerintah pusat oleh semua pemerintah daerah.</p>
9.	<p>Pemerintah daerah:</p> <p>a. Membuat Perda yang mengatur alokasi anggaran untuk lembaga kebudayaan.</p> <p>b. Mendata lembaga kebudayaan yang ada di daerah masing-masing.</p>	<p>Adanya anggaran untuk pembinaan dan fasilitasi lembaga kebudayaan oleh pemerintah daerah.</p>

4. Peningkatan peran pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelestarian budaya/bahasa:

No.	Rencana Aksi	Target
1.	Pemerintah daerah: a. Membentuk dinas pendidikan dan kebudayaan di setiap kabupaten/kota yang menangani kebudayaan. b. Melakukan penyuluhan “wajib ke museum” bagi peserta didik. c. Membuat program budayawan masuk sekolah. d. Mewajibkan penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah sebagai muatan lokal.	Tersedianya program pelestarian bahasa oleh pemerintah daerah.
2.	Menginventarisasi pelaku budaya dan kompetensi pelaku budaya.	Terwujudnya penempatan SDM kebudayaan yang kompeten.
3.	Pemerintah daerah: a. Membentuk dinas yang menangani kebudayaan (bagi kabupaten/kota yang belum memiliki SKPD yang mengurus kebudayaan). b. Membentuk sanggar seni untuk pengembangan/pelestarian kebudayaan di daerah. c. Mengalokasikan anggaran untuk pelestarian budaya dan bahasa.	Tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan/ bahasa oleh pemerintah daerah.
4.	Mengelola peninggalan/warisan/ dokumen budaya Indonesia yang ada di luar negeri oleh pemerintah pusat.	Terkelolanya peninggalan/warisan/ dokumen budaya Indonesia yang ada di luar negeri oleh pemerintah pusat.
5.	Pemerintah daerah: a. Menerbitkan peraturan daerah tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. b. Melestarikan bahasa daerah melalui muatan lokal di tingkat satuan pendidikan. c. Memperkuat kerjasama pemda dengan balai/ kantor bahasa yang ada di daerah.	Implementasi peran pemda dalam upaya meningkatkan melestarikan bahasa daerah.
6.	Menerbitkan regulasi terkait pelestarian budaya daerah oleh pemerintah daerah.	Terbitnya regulasi yang mengatur pelestarian budaya oleh pemerintah daerah.
7.	Menerbitkan regulasi terkait pengakuan hak-hak sipil penghayat kepercayaan.	Terbitnya regulasi yang mengakui hak-hak sipil penghayat kepercayaan oleh pemerintah daerah.
8.	Pemerintah daerah: a. Menyediakan wahana pembinaan pelestarian budaya/bahasa melalui penyuluhan dan pelatihan. b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan kebudayaan. c. Merevitalisasi dan mengkonservasi budaya/ bahasa yang hampir punah. d. Melibatkan langsung masyarakat dalam pelestarian budaya/bahasa.	Optimalisasi peran pemda dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya/bahasa daerah.

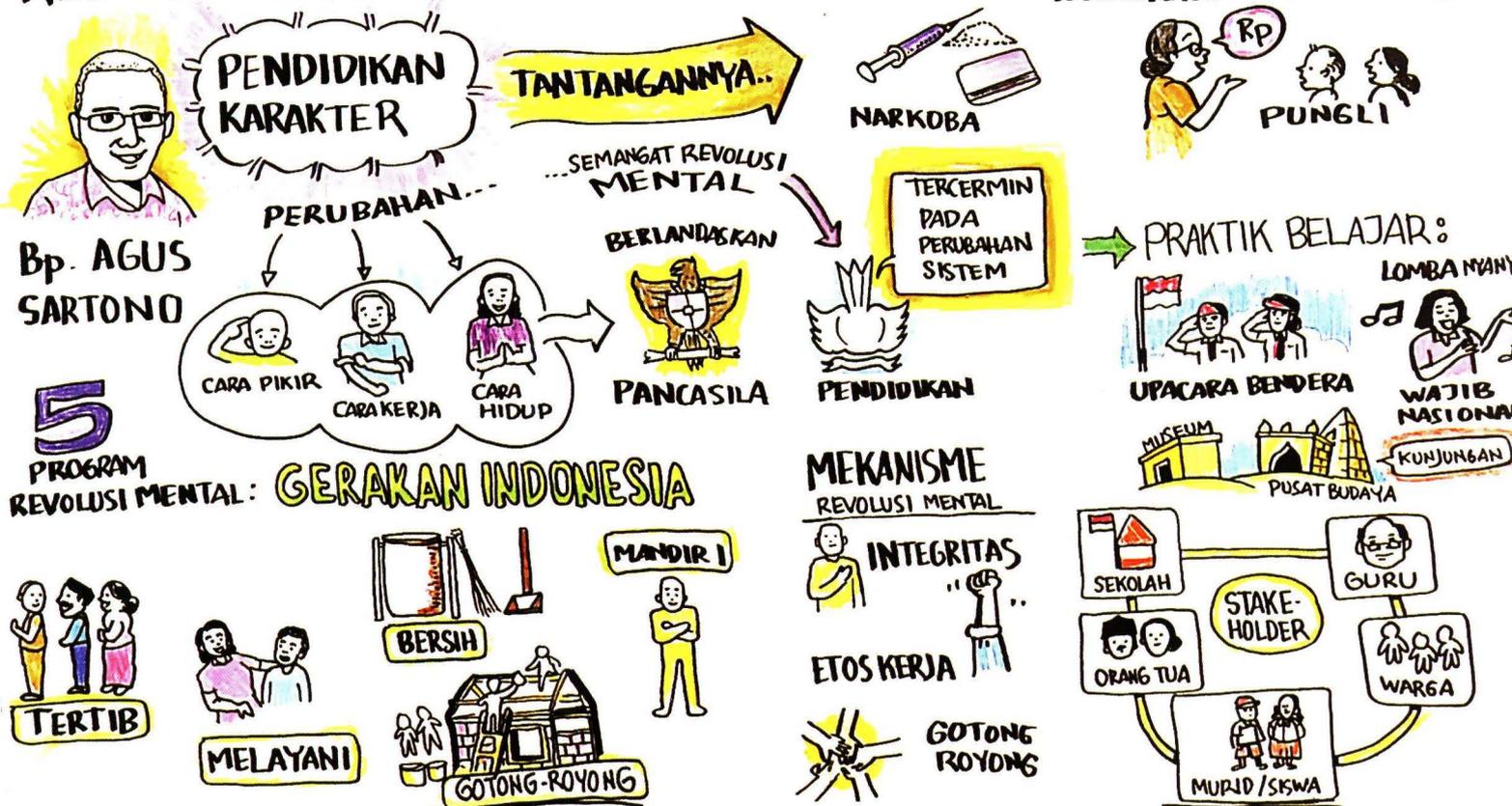




7

**REVOLUSI
MENTAL**

GERAKAN REVOLUSI MENTAL BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



“K

ONSTITUSI kita telah mengamanatkan pencerdasan bangsa sebagai tanggung jawab negara. Atas dasar itu, pemerintah menetapkan sistem pendidikan nasional,” tutur Deputy IV/Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika me-

nutup kegiatan RNPk 2017, Jumat (27/1), mewakili Menko PMK Puan Maharani.

Pendidikan nasional kemudian menjadi ujung tombak dalam konteks revolusi mental yang kini telah menjelma menjadi gerakan nasional. Lewat pendidikanlah, mental, pola pikir, persepsi maupun perilaku masyarakat bisa bertransformasi. Tujuannya pasti, demi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

GERAKAN *Revolusi* NASIONAL *Mental*

Revolusi Mental

bertumpu pada tiga nilai dasar:

Integritas

Etos kerja

Gotong royong

5

program Gerakan Nasional
Revolusi Mental:

- Program Gerakan **Indonesia Melayani**
- Program Gerakan **Indonesia Bersih**
- Program Gerakan **Indonesia Tertib**
- Program Gerakan **Indonesia Mandiri**
- Program Gerakan **Indonesia Bersatu.**

Banyak hal, menurutnya, sudah dilakukan untuk menggulirkan revolusi mental di lingkungan sekolah. Mulai dari upacara bendera setiap hari Senin sampai kunjungan siswa ke pusat sejarah dan budaya.

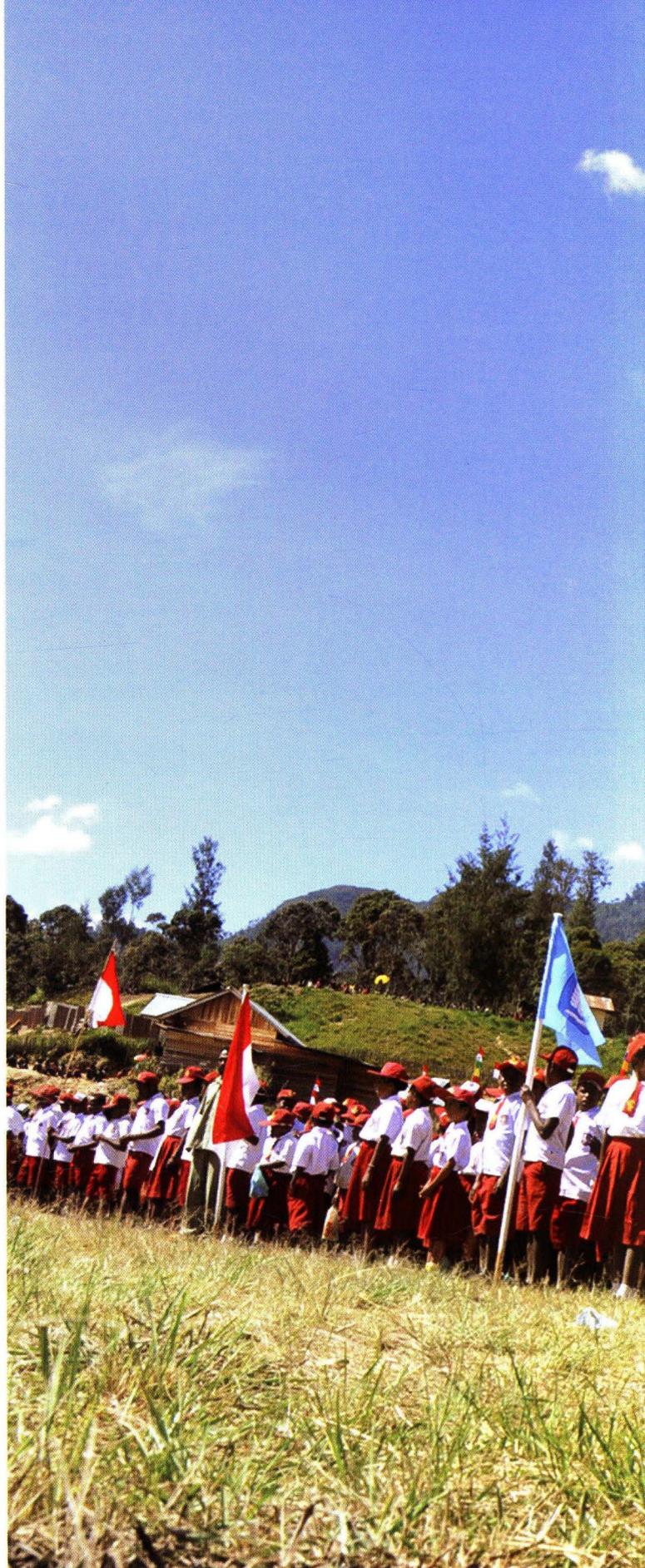
Dalam prosesnya, guru pun mengemban tugas penting di luar lingkungan keluarga. Sebagai pendidik, ia memiliki peran vital dalam pembentukan karakter anak bangsa. Ia pun harus mampu memotivasi dan menyemangati para anak didiknya.

Untuk lingkup sekolah yang berkelanjutan, lanjutnya, diperlukan gerakan revolusi mental yang berorientasi pada perubahan sistem pendidikan secara menyeluruh. “Personel, siswa didik, metode pembelajaran dan kelembagaannya yang membangun karakter bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

Lebih lanjut, momentum penutupan ritual tahunan Kemendikbud itu juga dimanfaatkan setiap komisi untuk melaporkan hasil akhir dan informasi yang disaring pada sidang sehari sebelumnya. Anggota Komisi I dari Dinas Pendidikan Gorontalo umpama, mengungkapkan soal distribusi Kartu Indonesia Pintar yang belum merata di provinsinya. Begitu pula soal masih bermasalahnya pendampingan anak tidak sekolah dari keluarga tidak mampu. Berangkat dari kondisi tersebut, Komisi I meminta Kemendikbud sebagai representasi pemerintah untuk memperkuat tata kelola pendidikan.

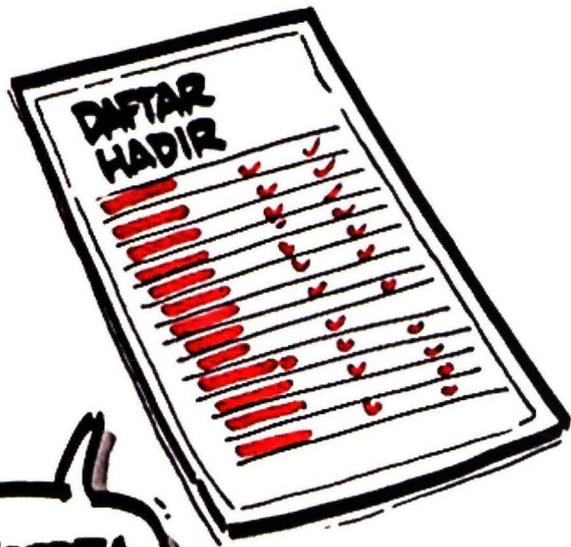
Laporan setiap komisi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Didik Suhardi, Ph.D selaku Ketua Panitia RNPk 2017.

“Melalui Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017 ini, diharapkan seluruh jajaran pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah berkomitmen atas pencapaian target kinerja program prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 dan renstra masing-masing SKPD. Juga, berbagai kebijakan dan program prioritas nasional pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di masa mendatang,” jelas Sesjen Kemendikbud.





PENUTUPAN



80%

HADIR SAMPAI AKHIR

PESERTA HAMPIR HADIR SEMUA



DIBUKA OLEH: PRESIDEN RI

REMBUK NASIONAL SAYA BUKA



YANG SAKIT TERTANGANI DENGAN BAIK





INSPIRATOR

PROGRAM TERPILIH SASARAN

SINERGI PUSAT-DAERAH

ROLMODEL

PENINGKATAN KOMPETENSI

PENDIDIKAN KARAKTER

BERSAING DIGLOBAL

PINTAR INDONESIA



Perpustakaan
Jendera
3